BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan jangka panjang, sementara Misi menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui program dan kebijakan terukur. Keduanya harus spesifik, terukur, dan selaras dengan tantangan aktual (seperti regenerasi petani atau adaptasi iklim) untuk memastikan implementasi efektif. Keberhasilan ditunjukkan oleh konsistensi antara pernyataan visi-misi dengan alokasi sumber daya dan capaian kinerja.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Visi tersebut memiliki makna, yaitu:

1. Adil untuk Semua

   Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Lestari

   Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang asri memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal
3. Berkeadaban

   Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 9 misi pembangunan jangka menengah. Adapun 9 misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri

   Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter dan

berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani

   Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

   Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Darah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi

menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban

Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang samas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia

   Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

   Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip peembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

   Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan pengelolaan lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan, melaksanakan pembangunan infrasturktur yang ramah

lingkungan, serta menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi

   Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**										
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,50	13,59-13,79	13,66-13,87	13,73-13,95	13,79-14,02	13,86-14,10	13,93-14,18
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	9,17-9,52	9,30-9,67	9,43-9,81	9,55-9,96	9,68-10,10	9,81-10,25
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	53,81	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00
				Literasi SMP (Poin)	62,39	62,50	63,00	63,50	63,80	64,00	65,00
				Numerasi SD (Poin)	56,17	56,50	56,70	57,00	57,50	58,00	60,00
				Numerasi SMP (Poin)	63,04	64,00	64,50	65,00	66,00	67,00	68,00
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	N/A	50,00	51,86	53,78	55,78	57,85	60,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	10,00	12,01	14,43	17,33	20,81	25,00
		1.2	Meingkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45	7,65-7,49	7,52-7,4	7,41-7,33	7,3-7,25	7,19-7,17	7,09-7,09
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)	67,41	68,76	70,14	71,54	72,97	74,43	75,92
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	0,50	0,66	0,87	1,15	1,52	2,00
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**										
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,96	71,93-72,11	72,18-72,36	72,43-72,61	72,68-72,85	72-94-73,10	73,19-73,35
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment	68,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				success rate) (%)							
				Jumlah Kematian Ibu	4	4	4	4	4	4	4
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	32,30	29,25	26,20	23,15	20,10	17,05	14,00
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,41	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**										
		3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio (Poin)	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228	0,215-0,225
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi (%)	2,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	73,81	74,00	75,16	76,34	77,54	78,76	80,00
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,62	35,40	40,78	46,97	54,10	70,19	80,85
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	90,00	93,69	97,52	101,52	105,67	110,00
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	95,00	97,83	100,74	103,73	106,82	110,00
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	20,00	22,97	26,39	30,31	34,82	40,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	N/A	10,00	13,20	17,41	22,97	30,31	40,00
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**										
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	11,26	11,61 – 11,80	12,04-12,24	12,49-12,7	12,95-13,17	13,43-13,66	13,93-14,17
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,33	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51	1,5-1,54
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Proporsi jumlah UMK non pertanian (%)	62,00	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
				Rasio Volume Usaha Koperasi	0,072	0,073	0,094	0,122	0,157	0,203	0,261

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				terhadap PDRB (%)							
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	10,00	10,50	11,03	11,58	12,16	12,76	13,40
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,42	12,79	13,18	13,57	13,98	14,40	14,83
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,34	41,25	42,35	43,45	45,50	47,07	48,00
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,34	7,49	7,64	7,79	7,94	8,10	8,26
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,38-0,48	0,4-0,5	0,42-0,52	0,44-0,54	0,46-0,57	0,49-0,6
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap	RoA BUMD (%)	N/A	6,25	6,85	7,52	8,25	9,04	9,92

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			pendapatan daerah								
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**										
		5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	60-70	61,23-71,26	62,48-72,54	63,76-73,85	65,07-75,18	66,4-76,53
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,47	3,55	3,64	3,73	3,81	3,91	4,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84,36 (B)	85,46	86,69	87,75	88,86	89,00	90,30

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	62,23	64,30	66,25	68,75	71,50	73,75	75,25
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
				Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**										
		6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	56,74	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64	50,08-57,64
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Persentase Warisan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Budaya yang Dilestarikan							
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,438	0,425-0,395	0,405-0,375	0,395-0,365	0,390-0,360	0,380-0,350	0,370-0,340
				Indeks Perlindungan Anak (Poin)	55,15	55,80	56,10	56,40	56,70	57,00	57,30
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**										
		7.1	Meningknya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	N/A	10,00	10,94	11,96	13,08	14,31	15,65
				Persentase Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	N/A	0,50	0,91	1,66	3,02	5,49	10,00
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas (%)	83,33	83,33	83,33	83,87	83,87	87,10	87,10
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	83,53	86,04	88,62	91,28	94,01	96,83	99,74
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien	Indeks Risiko Bencana (Poin)	181,49	172,42	163,79	155,60	147,82	140,83	133,41

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			terhadap bencana								
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**										
		8.1	Terwujunya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	N/A	57,97	60,13	67,04	70,54	74,45	77,96
			8.1.1	Terjaganhya kelestarian lingkungan hiduo	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
			8.1.2	Meningkatknya pengelolaan sampah	Timbulan Sampah (Ton)	N/A	66.000 ,00	64.753 ,82	63.531 ,17	62.331 ,61	61.154 ,69	60.000,0 0
			8.1.3	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	N/A	142.48 8,58	164.12 4,30	189.04 5,24	217.75 0,21	242.84 4,49	279.718, 44
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**										
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,26	1,89	2,52	3,14	4,40	5,03
		9.1.2	Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	73,61	77,40	81,39	85,59	90,00

Tabel 3.2 Penyelarasan Target Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,33 – 4,47	4,37-4,59
2	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDRB per Kapita (Rp juta)	35,40	70,19
3	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,20	1,90
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	10,20 – 9,53	8,28-7,54
5	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,230 – 0,240	0,218 - 0,228
6	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	74,55 – 76,76	75,99 - 78,36
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co_2 Eq)	142.488,58	242.844,49
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,97	74,45
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,65-7,49	7,19-7,17

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah diarahkan untuk mencapai visi pembangunan daerah, "Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban". Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah perlu mempersiapkan keberlanjutan pembangunan selama periode penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengembangkan fokus-fokus pembangunan. Penyusunan tema pembangunan sebagai fokus utama dilakukan secara tahunan dengan menyesuaikan kepada isu-isu strategis yang akan diselesaikan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan tema pembangunan juga memberikan perencanaan yang lebih terstruktur sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan dan isu strategis sembari mewujudkan visi dan misi-misi daerah.

Tema pembangunan disusun sebagai prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah juga mempersiapkan arah kebijakan tahunan yang susun secara bertahap mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan keberlanjutan pembangunan pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya.



Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 – 2030

Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2029 didasarkan dengan memedomani arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2045, khususnya pada bagian pembangunan tahap pertama. Pemerintah mempersiapkan periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2029 serta pedoman pembangunan pada masa transisi pemerintahan tahun 2030.

Fokus Pembangunan Tahun 2025

Fokus penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 adalah tahapan konsolidasi dan persiapan awal pembangunan daerah. Perencanaan pada tahun 2025 disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan RPJMD yang baru dimulai pada tahun 2025. Pemerintah fokus dalam penyesuaian program prioritas sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah yang menjadi visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah melakukan konsolidasi untuk penguatan kelembagaan serta regulasi-regulasi pendukung yang mempersiapkan arah kebijakan transformasional ke depannya. Pemerintah juga sudah mulai merintis penyelenggaraan program-program unggulan daerah yang dapat

memberikan hasil cepat (quick win) penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2026: Fondasi Kesejahteraan

Tahun 2026 menjadi tahun yang difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai titik utama pembangunan di daerah. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan kebijakan transformasional baik dari ekonomi, sosial maupun tata kelola menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif.

Tahun 2027: Transformasi Daerah

Dengan terwujudnya penguatan fondasi kebijakan transformasi yang kokoh pada tahun 2026, pemerintah berupaya membangun arah kebijakan transformasional. Pemerintah berupaya mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga layanan pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah mengedepankan transformasi sosial untuk memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang non-produktif secara ekonomi dan terkendala keterampilan. Pemerintah juga menyelenggarakan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal, membangun kemandirian daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tahun 2028: Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Demi mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Tapanuli Tengah memerlukan optimisasi infrastruktur dan aksesibilitas dari berbagai aspek pembangunan. Pemerintah fokus untuk

meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan. Pemerintah berupaya memberikan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat. Pemerintah juga menigkatkan akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau. Arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan menerapkan transisi hijau untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Tahun 2029: Nilai Budaya, Pendidikan Karakter dan Kepariwisataan

Visi dan misi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan transformasi dari nilai-nilai budaya, karakter dan kepariwisataan. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya dan dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menyinergikan pembangunan kebudayaam dalam kepariwisataan dan transformasi sosial. Penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk mencapai masyarakat berkeadaan yang tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang lestari serta memberikan kesejahteraan yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tahun 2030: Memperkuat Tapanuli Tengah yang Adil, untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Tahun 2030 menjadi tahun transisi kepemimpinan daerah sehingga fokus penyelenggaraan pemerintahan dibagi ke dua fokus utama, yaitu (1) memperkuat capaian pembangunan daerah yang memberikan wujud nyata dari visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 dengan mewujudkan Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban. Selain itu pemerintah juga mempertahankan capaian pembangunan sembari mempersiapkan transisi kepemimpinan daerah menuju periode pelaksanaan RPJPD Tahap 2.

Penjelasan tema pembangunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam tema prioritas pembangunan tahun 2026 sampai dengan 2030 dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Prioritas Pembangunan Daerah	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tema	Penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif	Penguatan landasan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan	Pembangunan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Perwujudan pembangunan Tapanuli Tengah yang Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban serta transisi kepemimpinan
Penjelasan umum	Pemerintah fokus untuk memperkuat modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil	Pemerintah melaksanakan pembangunan dengan memperkuat sektor perekonomian dengan memanfaatkan keunggulan lokal dengan pendekatan keberlanjutan. Penguatan UMKM dan iklim investasi pada tahapan ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pemerintah fokus untuk mengembangkan infrastruktur transportasi, digitalisasi serta energi yang mendukung konektivitas antar daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam transisi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan	Pemerintah berupaya untuk memperkuat identitas budaya serta nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pendidikan karakter, pelestarian budaya serta kepariwisataan berbasis budaya sebagai dasar perwujudan pembangunan masyarakat yang berkeadaban	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengoptimalkan sinergi pembangunan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing. Sinergi ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mewujudkan capaian berkeadaban dengan menjaga nilai-nilai luhur.

Dengan berdasar pada strategi, tema dan arah pembangunan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya maka dirumuskan arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut menjadi acuan penetapan program dan kegiatan sebagai bentuk perwujudan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai bentuk perwujudan strategi utama pembangunan ditetapkan program prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun yang disesuaikan dengan tema dan arah pembangunan.

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**				
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dan mengembangkan kurikulum pendidikan berkarakter
					Memberikan bantuan beasiswa sebagai akses pendidikan yang merata kepada keluarga kurang mampu dan berprestasi
					Merevitalisasi sekolah dengan fasilitas yang memadai dan memiliki akses untuk internet dan perpustakaan digital
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas untuk mengikuti gerakan literasi ilmiah
					Mempersiapkan akses internet gratis di ruang publik untuk langganan perpustakaan digital
					Membangun dan mempersiapkan perpustakaan desa, taman baca masyarakat serta pojok baca di ruang terbuka publik
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan daya saing atlet daerah	Peningkatan pembinaan atlet dan fasilitas olahraga
					Peningkatan dukungan finansial dan kesejahteraan atlet
		1.2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Memperkuat fungsi balai latihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal
					Memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah	Memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha atau bekerja mandiri
					Memberikan pelayanan inovasi bisnis dan inkubator usaha bagi wirausaha pemula
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**				
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan dan upaya promotif-preventif kesehatan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan	Memperkuat pelayanan Puskesmas dan tenaga medis yang memadai dengan akses yang mudah dari seluruh kecamatan
					Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta berkecukupan gizi
					Memperkuat deteksi penyakit menular dan tidak menular serta penanganan permasalahan kesehatan yang lebih baik
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan kepada masyarkaat	Memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat
					Memastikan masyarakat telah memiliki akses BPJS Kesehatan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
					Meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita
					Memberikan pemeriksaan kehamilan gratis secara berkala untuk deteksi dini stunting
					Menyediakan sarana air bersih dan akses air minum layak
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**				
	3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menerapkan kebijakan fiskal progresif dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah	Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif kepada masyarakat untuk berwirausaha
					Meningkatkan keterampilan kerja melalui kemitraan dan pelatihan vokasional
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Memperluas jaminan sosial dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelayanan sosial
					Memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mengoptimalkan sistem distribusi dan stok pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga	Mendistribusikan pangan secara merata ke seluruh wilayah sesuai kebutuhan
					Menguatkan pengawasan terhadap jaringan distribusi pangan
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mendukung produktivitas pertanian melalui teknologi tepat guna dan perbaikan infrastruktur penyimpanan	Mempersiapkan kawasan pertanian terpadu untuk peningkatan produktivitas pangan daerah
					Mempersiapkan diversifikasi sumber pangan lokal

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Memberikan akses harga yang adil dan pelatihan agribisnis bagi petani kecil	Memberikan subsidi alat dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah
					Mengembangkan rantai distribusi yang lebih optimal untuk pemasaran hasil pertanian
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Menyediakan sarana tangkap modern dan akses pasar yang luas untuk nelayan tradisional	Mempersiapkan bantuan peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan
					Memberikan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan yang memberikan nilai tambah kepada nelayan dan masyarakat
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Mendorong kebijakan inklusif dan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas	Meregulasi kebijakan kuota minimal bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja disabilitas
					Memberikan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital untuk penyandang disabilitas
					Meregulasi lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Menyediakan perlindungan sosial dan program pengembangan keterampilan untuk pekerja informal	Memberikan perlindungan sosial yang layak bagi tenaga kerja rentan dalam sektor informal
					Memberikan pelatihan bagi tenaga kerja informal untuk memperluas peluang kerja formal
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**				
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik yang terintegrasi	Mengembangkan kawasan industri terpadu berbasis potensi daerah
					Meningkatkan infrastruktur logistik yang lebih baik untuk kelancaran distribusi barang
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata dan kebudayaan, serta karya ekonomi kreatif dengan kearifan lokal	Mengelola daya tarik dan destinasi wisata dengan konsep berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya lokal
					Memberikan pelatihan dan pengembangan desa wisata melalui keterlibatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama
					Mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan festival budaya sebagai daya tarik wisata
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Digitalisasi dan Kemitraan Strategis	Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Kredit dan Koperasi
					Promosi Ekspor dan Pemasaran Produk UMKM melalui Kolaborasi dan Platform Digital
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Menyederhanakan regulasi serta memberikan insentif yang menarik bagi investor	Mempersiapkan penawaran peluang investasi kepada para investor melalui penyusunan potensi investasi daerah
					Meningkatkan akses konektivitas antar wilayah
					Memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah pada sektor-sektor unggulan
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Memperkuat rantai pasok dan memperluas jaringan	Penguatan nilai tambah melalui hilirisasi produk-produk lokal

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				distribusi dalam negeri dan ekspor	Peningkatan akses menuju pasar lokal, luar daerah, nasional dan internasional
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Menyediakan jaringan internet dan telekomunikasi di seluruh daerah khususnya pada area blank spot
					Memberikan sosialisasi dan edukasi digital bagi seluruh masyarakat secara berkala
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah		
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan potensi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan efisiensi pajak daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah
					Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
					Penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan profesionalisme manajemen dan inovasi layanan di BUMD agar lebih kompetitif dan produktif	Meningkatkan kualitas tata kelola BUMD
					Menginisiasi diversifikasi bisnis dan inovasi
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Berbasis Teknologi Digital	Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Terintegrasi
					Peningkatan Kapasitas Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**				
	5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel			
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Menguatkan sistem e-government yang terbuka dan mekanisme pelaporan publik secara real-time	Meningkatkan penerapan e-government dalam memberikan transparansi layanan publik
					Memperkuat kapasitas unit pemberantas korupsi terutama pada urusan yang rawan terhadap korupsi
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja berbasis kompetensi	Memperkuat pelaksanaan penilaian kinerja ASN berbasis kompetensi dan meritokrasi
					Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada ASN untuk membangun kompetensi dan profesionalitas diri
					Membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penilaian pemberian pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam program sosialisasi dan sekolah	Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
					Meningkatkan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia melalui hukum yang berkeadilan
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**				
	6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis			

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan edukasi parenting dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan	Memberikan layanan konseling keluarga dalam membina perilaku rumah tangga yang harmonis
					Membangun kebijakan yang memberikan keseimbangan work-life balance kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga
					Memberikan edukasi parenting bagi orang tua untuk mengoptimalkan pola asuh positif di lingkungan keluarga
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Meningkatkan pelestarian cagar budaya daerah	Mempersiapkan pusat kebudayaan dan galeri seni untuk melestarikan warisan budaya daerah
					Membangun integrasi budaya dalam pendidikan berbasis kurikulum muatan lokal berkarakter dan berbudaya
					Membangun sinergi dengan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya daerah
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan keamanan masyarakat	Penguatan sistem keamanan lingkungan
					Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan
					Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Menguatkan regulasi dan kampanye kesetaraan gender serta layanan	Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di lingkungan kerja

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				perlindungan anak yang responsif.	Membangun kebijakan penegakan hukum terhadap kasus bullying, kekerasan anak dan eksploitasi anak
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**				
		7.1	Meningknya kualitas infrastruktur daerah		
		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan prioritas wilayah tertinggal dan padat penduduk	Mengoptimalkan perluasan akses jaringan listrik dan air bersih untuk menjangkau seluruh wilayah Tapanuli Tengah
					Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas desa dan kecamatan
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan moda transportasi massal yang terintegrasi dan tarif yang ramah bagi masyarakat	Meningkatkan keamanan di jalan lintas dengan pemasangan rambu, penerangan jalan serta pemantauan pada daerah rawan kecelakaan
					Mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan modern untuk mendukung aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah dengan angkutan umum masif
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Mendorong pembangunan perumahan dengan konsep ramah lingkungan dan subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah	Mempersiapkan kemudahan akses kredit perumahan bersubsidi kepada masyarakat khususnya pekerja sektor informal dan UMKM
					Mewujudkan revitalisasi kawasan permukiman kumuh serta memberikan fasilitas air bersih dan sanitasi layak di seluruh rumah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Menerapkan standar bangunan tahan bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini di daerah rawan	Mempersiapkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, khususnya banjir, longsor, gempa dan tsunami
					Memberikan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala kepada aparatur dan masyarakat
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**				
		8.1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		
		8.1.1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Menerapkan pengelolaan kawasan hijau dan pengawasan kualitas udara, air, dan lahan	Melaksanakan kebijakan konservasi hutan lindung dan normalisasi daerah aliran sungai
					Meningkatkan pengawasan terhadap limbah industri dan persampahan
					Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program gotong royong merawat lingkungan serta sadar lingkungan
		8.1.2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Mengoptimalkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan edukasi pengurangan sampah di masyarakat	Menguatkan sistem pengelolaan sampah
		8.1.3	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Mendorong penggunaan teknologi rendah karbon dan restorasi ekosistem penyerap karbon	Meningkatkan bauran EBT pada sektor energi listrik dan transportasi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**				
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata		
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Mengembangkan badan usaha dan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi desa
					Memperkuat kelembagaan dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
					Memperkuat perekonomian melalui produk unggulan di setiap desa
					Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak
		9.1.2	Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif dan berbasis data dalam proses perencanaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
					Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan analisis kebijakan publik

3.3 Program Prioritas

Program Prioritas adalah program yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan dengan fokus pada penyelesaian permasalahan utama secara cepat, tepat, dan terukur. Program Prioritas bertujuan untuk memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan Program Prioritas didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan Masyarakat. Program Prioritas menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi pembangunan, sekaligus menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah. Program prioritas pembangunan disusun selaras dengan isu strategis pembangunan daerah. Ada pun Program prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kegiatan strategis untuk mendukung program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Isu Strategis, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
1	Optimalisasi hilirisasi industri berbasis SDA	1	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian Pengolahan perkebunan Berkelanjutan dan perikanan
				Peningkatan daya saing produk UMK menuju ekspor
				Pembangunan pusat kuliner dan pusat UMK
				Penataan dan pengembangan destinasi wisata bahari, wisata religi (inclinator makam Papan Tinggi), Pemandu Wisata dan kepulauan
				Penataan bibir pantai sebagai destinasi wisata dan pusat kuliner seafood
				Pengembangan dan mempromosikan situs dan cagar budaya sebagai destinasi wisata
				Penyusunan potensi dan peluang investasi daerah

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
		2	Peningkatan Kemandirian Daerah	Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah
				Optimalisasi tata telola BUMD dan Koperasi
				Pengembangan sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah berbasis digital
		3	Penguatan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Penguatan pertanian berbasis komoditas unggulan termasuk hortikultura
				Pengembangan sistem pertanian berbasis kearifan local
				Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil produksi pangan organik dalam rangka pemenuhan
				Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi
				Stabilisasi Harga dan Jaminan Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian
				Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian
2	Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas	4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik
				Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik
				Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah
				Penurunan kawasan permukiman kumuh
				Peningkatan akses air minum aman
				Peningkatan akses sanitasi aman
				Peningkatan konektivitas antar daerah
		5	Peningkatan Ketahanan Daerah	Pemetaan desa rawan bencana
				Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat
				Peningkatan respon time terhadap bencana

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
3	Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat, dan Unggul	6	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat
				Pemerataan Kualitas Pembelajaraan di tingkat Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan
				Penyediaan program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan guru berprestasi
				Pemberian insentif dan fasilitas untuk guru-guru di daerah terjauh dan tertinggal, dan guru madrasah dan sekolah minggu
				Pengembangan perpustakaan digital
		7	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK)
				Pelatihan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui BLK
				Pelatihan calon wirausaha untuk pemuda dan masyarakat
				Membuat MoU dan PKS dengan perusahaan swasta untuk pekerja lokal dan penyandang disabilitas
				Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri
		8	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata	Penguatan program UHC
				Pengembangan Rumah Sakit Unggul dan Berkualitas
				Perluasan layanan kesehatan dengan menambah Puskesmas Rawat Inap dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas
				Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terjauh dan tertinggal
		9	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat	Pembangunan pusat moderasi beragama
				Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
				Pengembangan kurikulum pendidikan untuk kebudayaan lokal
				Pembangunan taman budaya sebagai wadah seni dan pengembangan budaya
		10	Peningkatan Budaya dan Olahraga	Tersedianya kalender event seni dan budaya
				Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di setiap desa
				Pembangunan *creative-hub* (alun-alun) di kecamatan
				Pembentukan layanan help desk (*call center*) untuk permasalahan rumah tangga
		11	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak
				Edukasi parenting sebelum pernikahan
				Sistem Keamanan yang efektif dengan melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum
				Peningkatan hubungan kemitraan dengan para stakeholder terkait dalam rangka menjaga kamtibmas
		12	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan serta Partisipasi aktif dari masyarakat dengan melakukan kolaborasi antar Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Influencer Lokal dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan edukasi dan menyampaikan pesan - pesan tentang bahaya judi online, narkoba
				Dukungan penyelesaian konflik Agraria
				Pemberian bantuan bibit unggul pertanian dan alsintan
				Pemberian bantuan benih unggul untuk perikanan
				Peningkatan kualitas irigasi untuk pertanian
4	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	13	Peningkatan Ekonomi Rakyat	Optimalisasi penyuluh pertanian dan perikanan
				Bantuan sosial modal kerja untuk kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, abang becak, pemandu wisata dan UKM
				Perlindungan sosial kepada petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
				pelaku UKM melalui BPJS Ketenagakerjaan
				Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan
				Pembangunan Tempat pelelangan Ikan dan *cold storage* untuk perikanan
5	Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi	14	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (Circular Economy)
				Peningkatan layanan persampahan
				Pemanfaatan sumber daya air dan angin sebagai sumber EBT
6	Tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas	15	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Pembangunan Kantor Induk Pemerintahan/Kantor Bupati dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas SDM ASN penyelenggara pelayanan publik
				Optimalisais kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online)
				Optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (media sarana pengaduan dan survei kepuasan publik secara berkala)
				Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		16	Pengembangan Desa dan Perencanaan Pembangunan	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
				Pemberdayaan masyarakat desa
				Pemetaan potensi dan sumber pendapatan desa
				Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih
				Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**					
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
					Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi SD (Poin)	
					Literasi SMP (Poin)	
					Numerasi SD (Poin)	
					Numerasi SMP (Poin)	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
					Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	
					Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Pembinaan Perpustakaan
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga		Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		1.2	Meingkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)	
				Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Penempatan Tenaga Kerja
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
					Pertumbuhan Wirausaha	
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**					

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
					Angka Kematian Ibu	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
				Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**					

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan		Gini Ratio (Poin)	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	
				Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi (%)	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp juta)	
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (Poin)	
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan		Nilai Tukar Nelayan (Poin)	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Peningkatan produksi hortikultura	
					Peningkatan produksi komoditas peternakan	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Hubungan Industrial
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**					
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Proporsi jumlah UMK non pertanian (%)	
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat		Indeks Masyarakat Digital (Poin)	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah		RoA BUMD (%)	
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Level)	
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pengelolaan Keuangan Daerah
					Persentase Penurunan SILPA	
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**					
		5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejagteraan Rakyat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian Daerah
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**					
		6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan KS
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Indeks Perlindungan Anak (Poin)	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	Peningkatan Kualitas Keluarga
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**					
		7.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Poin)	
			7.1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	
					Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	
					Persentase Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas (%)	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Penanggulangan Bencana

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**					
		8.1	Terwujunya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
			8.1.1 Terjaganhya kelestarian lingkungan hidup		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
			8.1.2 Meningkatknya pengelolaan sampah		Timbulan Sampah (Ton/Hari)	
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan
			8.1.3 Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan ilingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**					
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata		Indeks Desa (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri (%)	
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Penataan Desa
		9.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta unsur penunjang dan unsur kewilayahan. Program Perangkat daerah merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	**Layanan Urusan Wajib Dasar**														
1	**Pendidikan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	66,83	67,78	276.459.354.950	68,48	288.584.063.268	68,90	291.407.725.904	69,51	295.048.769.064	69,98	299.846.479.494	70,10	306.951.682.491
	Program Pengelolaan Pendidikan	Iklim Keamanan SD	69,40	70,87	97.762.860.659	71,52	109.217.770.769	72,20	110.286.416.539	73,50	111.664.408.840	74,90	113.480.154.422	75,5	116.169.195.609
		Iklim Keamanan SMP	68,84	69,78		70,80		71,90		73,25		74,50		75,5	
		Iklim Kebhinekaan SD	70,93	70,93		71,10		71,70		72,25		72,65		73	
		Iklim Kebhinekaan SMP	74,25	74,25		74,70		75,00		75,50		76,00		76,5	
		Iklim Inklusivitas SD	52,39	55,17		57,05		57,75		58,10		58,80		59,25	
		Iklim Inklusivitas SMP	57,09	57,46		57,90		58,10		58,60		59,25		59,5	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	N/A	15,00	97.304.790	25,00	203.729.455	45,00	205.722.855	60,00	208.293.294	70,00	211.680.296	80,00	216.696.301
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas Pembelajaran SD	63,10	63,10	1.479.992.262	63,50	1.977.710.526	63,80	1.997.061.516	64,00	2.022.014.139	64,20	2.054.893.579	64,50	2.103.586.617
		Kualitas Pembelajaran SMP	65,17	65,17		65,25		65,80		66,10		66,30		66,70	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	N/A	5,00	-	6,00	200.000.000	7,00	201.956.908	8,00	204.480.293	9,00	207.805.293	10,00	212.729.476
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Pengembangan Bahasa dan Sastra	N/A	2	535.188.954	2	570.525.446	2	576.107.776	3	583.306.052	3	592.791.039	3	606.837.896
	Jumlah				**376.334.701.615**		**400.753.799.465**		**404.674.991.497**		**409.731.271.682**		**416.393.804.123**		**426.260.728.391**
2	**Kesehatan**														
	Dinas Kesehatan														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	69,95	82.396.905.642	70,50	85.523.819.012	71,10	85.360.630.336	71,60	85.727.183.182	72,00	86.121.170.359	72,50	88.161.909.336
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Balita	0	1	90.317.394.709	3	100.280.709.001	3	102.242.340.640	3	104.194.835.535	3	106.856.598.876	3	109.341.295.117
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	52,00	80,00		85,00		90,00		93,00		95,00		95,00	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,95	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	N/A	77,00		78,00		79,00		79,50		80,00		80,00	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50	50,00	113.000.117	55,00	245.000.000	55,00	247.397.213	60,00	250.488.359	60,00	254.561.484	65,00	260.593.608
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	N/A	100,00	89.599.689	100,00	205.000.000	100,00	207.005.831	100,00	209.592.300	100,00	213.000.426	100,00	218.047.713
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	5,00	5,00	129.998.836	9,00	218.000.000	12,00	220.133.030	18,00	222.883.519	20,00	226.507.770	20,00	231.875.129
	Jumlah				**175.046.898.993**		**186.472.528.013**		**188.277.507.050**		**190.604.982.895**		**193.671.838.915**		**198.213.720.903**
	RSUD PANDAN														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	70,00	70,50	58.324.464.391	71,00	62.175.407.094	71,50	62.783.764.922	72,00	63.568.227.300	72,50	64.601.893.525	73,00	66.132.708.788

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	77,00	77,00	9.719.790.700	77,00	10.361.551.537	77,00	10.462.934.564	77,00	10.593.665.471	77,00	10.765.926.279	77,00	11.021.037.134
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten	0,03	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	15,00	16,00	8.923.200.000	16,50	9.512.364.980	16,50	9.605.439.107	16,50	9.725.455.892	17,00	9.883.598.972	17,00	10.117.802.079
	Jumlah				**76.967.455.091**		**82.049.323.611**		**82.852.138.592**		**83.887.348.663**		**85.251.418.776**		**87.271.548.000**
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	100,00	19.463.125.510	100,00	20.748.201.712	100,00	20.951.213.344	100,00	21.212.991.826	100,00	21.557.930.707	100,00	22.068.770.368
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	20,00	5.979.816.558	20,00	6.374.641.117	20,00	6.437.014.055	20,00	6.517.442.417	22,50	6.623.420.834	25,00	6.780.370.316

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	N/A	20,00		20,00		20,00		20,00		22,50		25,00	
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	15,00		15,00		17,50		20,00		22,50		25,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum (%)	N/A	61,13		61,13	5.000.000.000	61,13	5.500.000.000	61,13	6.000.000.000	61,13	6.500.000.000	61,13	7.000.000.000
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan Aman)	N/A	40,00	200.000.000	40,00	311.879.400	40,00	500.000.000	40,00	550.000.000	40,00	600.000.000	40,00	650.000.000
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	57,00	200.000.000	59,00	713.205.240	60,00	720.183.626	61,00	729.182.082	62,00	741.039.120	63,00	758.598.884
	Program pengembangan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur	N/A	60,00		65,00	190.996.400	68,75	192.865.212	72,50	195.274.999	76,25	198.450.315	80,00	203.152.820

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Permukiman dalam Kondisi Baik													
	Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	70,00	20.544.286.626	75,00	16.111.077.227	81,25	15.632.570.427	87,50	15.352.862.240	93,75	15.159.018.922	100,00	15.136.471.664
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	65,00	2.834.622.496	70,00	3.021.781.846	77,50	3.051.348.594	85,00	3.089.474.186	92,50	3.139.711.313	100,00	3.214.110.340
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	61,12	63,00	37.433.446.610	65,00	46.633.408.806	70,00	46.130.190.306	75,00	45.807.253.399	80,00	45.782.182.606	85,00	46.427.823.019
	Jumlah				**86.655.297.800**		**99.105.191.747**		**99.115.385.564**		**99.454.481.150**		**100.301.753.816**		**102.239.297.411**
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	N/A	100,00	3.798.996.900	100,00	3.784.794.900	100,00	3.849.979.354	100,00	3.920.480.473	100,00	4.039.731.506	100,00	4.196.337.163
	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleg Rumah Layak Huni	N/A	100,00	659.725.099	100,00	653.199.039	100,00	653.199.039	100,00	673.199.039	100,00	673.199.039	100,00	693.199.039

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	N/A	16,47	1.000.000.000	15,96	1.000.000.000	15,73	1.000.000.000	15,48	1.000.000.000	15,23	1.000.000.000	14,99	1.000.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani	N/A	100,00	-	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	N/A	80,00	1.235.000.000	85,00	1.100.000.000	88,75	1.100.000.000	92,50	1.100.000.000	96,25	1.100.000.000	100,00	1.100.000.000
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU	N/A	85,00	-	90,00	10.000.000	95,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Jumlah				**6.693.721.999**		**7.107.993.939**		**7.173.178.393**		**7.263.679.512**		**7.382.930.545**		**7.559.536.202**
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**														
	Satuan Polisi Pamong Praja														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.967.503.674		4.277.295.103		4.459.306.988		4.667.272.336		4.885.635.950		5.091.666.841,87
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	75,00	75,00	6.555.350.000	75,00	6.266.530.043	100,00	6.568.356.545	100,00	6.885.274.372	100,00	7.218.038.090	100,00	7.567.439.994
		Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	85,00		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		65,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
	Program pencegagan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	100,00	2.864.071.301	100,00	3.194.347.500	100,00	3.300.964.875	100,00	3.412.913.119	100,00	3.530.458.775	100,00	3.653.881.713
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah				**14.386.924.975**		**13.738.172.646**		**14.328.628.408**		**14.965.459.827**		**15.634.132.815**		**16.312.988.548,87**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Badan Penanggulangan Bencana														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.232.010.190,00		3.445.407.539		3.479.119.270		3.522.589.715		3.579.869.620		3.664.698.698
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	65,00	2.312.781.388	70,00	2.535.097.403	80,00	2.559.902.168	90,00	2.591.887.299	100,00	2.634.033.297	100,00	2.696.449.708
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah				**5.544.791.578**		**5.980.504.942**		**6.039.021.439**		**6.114.477.014**		**6.213.902.917**		**6.361.148.406**
6	**Sosial**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	68,42	69,50	3.178.788.545	71,6	3.338.671.871	72,7	3.371.339.243	73,8	3.413.463.012	74,9	3.468.968.436	76,10(	3.551.169.585

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Diluar Panti Rehabilitasi Sosial	80,3	80,6	49.999.420	80,9	83.000.000	81,2	83.812.117	81,5	84.859.322	81,8	86.239.197	100,00	88.282.732
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Diluar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	80,3	80,6		80,9		81,2		81,5		81,8		100,00	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	55	56,5		58		59,5		61		62,5		64	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	75	75		80		90		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	84,77	85,00	437.241.096	85,50	441.255.798	86,00	445.671.129	86,50	451.364.589	87,00	458.866.717	87,50	469.977.047
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	83,26	83,50		84,00		84,50		85,00		85,50		86,00	
		Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85,19	85,50		86,00		86,50		87,00		87,50		88,00	
		Persentase Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	82,36	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		85,00	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	27,00	27,10	47.773.101	27,20	100.000.000	27,30	100.978.454	27,40	102.240.147	27,50	103.902.647	27,60	106.364.738
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah	80,97	81,00	331.996.780	82	340.000.000	83,00	343.326.744	84,00	347.616.498	85,00	353.268.999	86,00	361.640.109

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tanggap Darurat Bencana													
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	70,00	72,00		73		75,00		75,00		78,00		80,00	
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Terkelola dengan baik	100,00	100,00	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Jumlah				**4.045.798.942**		**4.312.927.669**		**4.355.127.687**		**4.409.543.567**		**4.481.245.996**		**4.587.434.211**
II	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**														
7	**Tenaga Kerja**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	70,00	3.366.545.157	70,50	3.563.446.907	71,00	3.598.313.599	72,00	3.643.273.338	73,00	3.702.515.647	73,50	3.790.250.962
	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100,00	100,00	69.999.751	100,00	100.000.000	100,00	100.978.454	100,00	102.240.147	100,00	103.902.647	100,00	106.364.738
	Program Pelatihan kerja dan	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang	70,00	75,00	192.993.908	75,00	205.736.562	80,00	207.749.600	80,00	210.345.363	85,00	213.765.733	85,00	218.831.155

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	produktivitas tenaga kerja	Meningkat Produktivitasnya													
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	50,90	55,21	204.999.867	57,96	218.535.229	61,59	220.673.496	62,85	223.430.738	64,25	227.063.887	67,46	232.444.424
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	32,00	40,00		45,00		53,00		60,00		65,00		70,00	
	Program hubungan industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.432	11.686	142.780.985	11.989	152.208.271	12.231	153.697.559	12.389	155.617.959	12.578	158.148.422	12.871	161.895.928
	Jumlah				**3.977.319.668**		**4.239.926.969**		**4.281.412.708**		**4.334.907.544**		**4.405.396.336**		**4.509.787.207**
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,67	67,00	2.887.959.369	68,00	3.053.200.699	69,50	3.083.074.867	70,70	3.121.596.867	72,00	3.172.356.333	73,00	3.247.528.921

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	66,75	67,00	90.499.744	67,50	96.475.098	68,00	97.419.063	68,50	98.636.282	69,00	100.240.180	69,50	102.615.485
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31,25	32,50		35,00		37,50		40,00		42,00		44,00	
	Program perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kompregensif	100,00	100,00	82.498.297	100,00	87.945.346	100,00	88.805.851	100,00	89.915.451	100,00	91.377.542	100,00	93.542.837
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	100,00	100,00	7.499.883	100,00	10.000.000	100,00	10.097.845	100,00	10.224.015	100,00	10.390.265	100,00	10.636.474
	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	N/A	58,50	49.795.372	59,50	53.083.171	60,50	53.602.566	61,50	54.272.312	62,50	55.154.820	63,50	56.461.776
	Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	90.584.338	100,00	120.000.000	100,00	121.174.145	100,00	122.688.176	100,00	124.683.176	100,00	127.637.685
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	N/A	48,00		49,44		50,92		52,45		54,02		55,65	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**3.208.837.003**		**3.420.704.314**		**3.454.174.336**		**3.497.333.102**		**3.554.202.316**		**3.638.423.178**
9	**Pangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.414.665.859,00	75,00	2.574.097.067,95	75,00	2.599.283.426,58	75,00	2.631.760.613,36	75,00	2.674.554.980,49	75,00	2.737.931.599,40
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				65	-	65	150.000.000,00	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan				70	-	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	81,30	81,60	1.095.998.820,00	82,27	1.168.363.456,39	82,94	479.795.356,68	82,94	494.536.509,48	84,31	513.960.553,47	85,00	542.726.728,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				70	-	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**3.510.664.679**		**3.742.460.524**		**3.779.078.783**		**3.826.297.123**		**3.888.515.534**		**3.980.658.327**
10	**Pertanahan**														
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	N/A	100,00	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	N/A	15,00	-	30,00	10.000.000	50,00	10.000.000	70,00	10.000.000	85,00	10.000.000	95,00	10.000.000
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	N/A	10,00	10.000.000	25,00	10.000.000	45,00	10.000.000	65,00	10.000.000	80,00	10.000.000	90,00	10.000.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi			15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000
	Program Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	N/A	10,00	10.000.000	25,00	20.000.000	45,00	20.000.000	65,00	20.000.000	80,00	20.000.000	90,00	20.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**35.000.000**		**65.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**
11	**Lingkungan Hidup**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTerlaksanaya Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	94	3.068.034.135	95	3.068.034.135,00	95	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00
	Program perencanaan lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100,00	130.000.000	100,00	138.583.406	100,00	139.939.381	100,00	141.687.877	100,00	143.991.827	100,00	147.403.876
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	N/A	47,00	172.265.000	50,00	183.639.003	62,25	185.435.827	66,50	187.752.786	70,75	190.805.785	75,00	195.327.144
		Indeks Kualitas Udara		73,00		75,00		78,00		80,00		83,00		85,00	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		49,00		50,00		55,00		60,00		65,00		70,00	
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	N/A	55,00	14.993.000	60,00	15.982.931	67,50	16.139.316	75,00	16.340.972	82,50	16.606.688	90,00	17.000.202

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	N/A	75,00	57.184.015	80,00	60.959.658	85,00	61.556.120	90,00	62.325.244	95,00	63.338.698	100,00	64.839.581
	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Penyulug Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00	29.989.000	80,00	31.969.060	85,00	32.281.862	90,00	32.685.213	95,00	33.216.699	100,00	34.003.807
	Program penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan	N/A	100,00	39.929.000	100,00	42.565.360	100,00	42.981.843	100,00	43.518.887	100,00	44.226.536	100,00	45.274.534
	Program pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	25,00	5.462.132.000	30,00	5.822.775.815	43,75	5.879.749.005	57,50	5.953.214.524	71,25	6.050.018.180	85,00	6.193.380.234
	Program Keanekaragaman Hayati (KeHati)	Persentase RTH					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapsitasnya					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018
	Jumlah				**8.974.526.150**		**9.567.080.001**		**9.660.689.489**		**9.781.396.609**		**9.940.449.327**		**10.175.999.567**
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	68,42	69,50	4.024.189.407	70,70	4.939.891.338	71,90	4.988.225.908	73,10	5.050.552.141	74,30	5.132.677.841	75,20	5.254.302.474
	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	9,11	10,00	698.790.011	14,00	744.928.459	18,00	752.217.243	22,00	761.615.948	26,00	774.000.385	30,00	792.341.203

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,90	34,00		39,20		44,40		49,60		54,80		60,10	
	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	199.999.850	100,00	213.205.080	100,00	215.291.194	100,00	217.981.186	100,00	221.525.721	100,00	226.775.024
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	18,2	24,2	774.855.468	24,2	176.016.229	27,3	177.738.467	30,3	179.959.251	33,3	182.885.521	36,4	187.219.201
	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	29.980.137	100	31.959.611	100	32.272.322	100	32.675.554	100	33.206.882	100	33.993.757
	Jumlah				**5.727.814.873**		**6.106.000.719**		**6.165.745.134**		**6.242.784.080**		**6.344.296.350**		**6.494.631.660**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,67	65,80	2.605.195.500	66,76	2.677.206.657	69,75	2.703.401.896	71,25	2.737.180.008	72,75	2.781.688.572	74,50	2.847.603.844
	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	15,00	-	15	100.000.000	15	100.978.454	15	102.240.147	15	103.902.647	15	106.364.738
	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	100,00	2.126.835.000	100	2.267.261.831	100	2.289.445.948	100	2.318.051.818	100	2.355.745.049	100	2.411.567.104
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00	689.340.700	63	734.855.246	66	742.045.468	69	751.317.080	72	763.534.050	75	781.626.857
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	10,00		13		16		19		22		25	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat Hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	N/A	75,00	499.999.930	80	533.013.025	80	538.228.313	80	544.953.298	80	553.814.640	85	566.937.907
		Persentase Fasilitasi Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	N/A	75,00		80		80		80		80		85	
	Jumlah				**5.921.371.130**		**6.312.336.760**		**6.374.100.078**		**6.453.742.351**		**6.558.684.958**		**6.714.100.449**
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	70,42	5.056.958.000	71,22	5.150.000.000	72,00	5.200.390.387	72,80	5.265.367.545	73,20	5.350.986.302	74,00	5.477.784.001
	Program pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,73	2,67	1.493.396.739	2,69	1.632.849.766	2,67	1.648.826.451	2,65	1.669.427.993	2,64	1.696.574.122	2,6	1.736.776.373
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	14,7	13,7-13,4		12,6-12,3		11,7-11,4		11,0-10,7		10,4-10,1		10,1-9,8	
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Rasio Akseptor KB (%)	N/A	41,50	7.544.959.749	42,70	8.143.124.764	43,50	8.222.801.503	44,50	8.325.542.689	45,50	8.460.922.149	47,00	8.661.413.312
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	39,70	40,50		41,00		42,00		42,75		43,50		44,25	
		Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	25,30	20,00		16,52		16,00		15,00		14,00		13,00	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	28,40	33,00		38,30		44,50		50,00		56,50		70,10	
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	79,30	80,90	3.235.438.800	82,40	3.549.062.527	83,80	3.583.788.475	85,10	3.628.566.727	86,20	3.687.569.896	87,00	3.774.951.054
		Indeks Lansia Berdaya	63,30	64,30		65,20		66,10		67,00		67,80		70,00	
	Jumlah				**17.330.753.288**		**18.475.037.056**		**18.655.806.816**		**18.888.904.953**		**19.196.052.468**		**19.650.924.740**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	**Perhubungan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemrintahan Umum	N/A	100	2.677.156.464	100	4.173.918.930	100	3.997.156.464	100	4.237.850.895	100	4.285.297.301	100	4.355.563.389
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkatan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	N/A	38,00	1.410.999.264	38,00	184.162.182	39,00	403.566.472	39,00	217.857.619	40,00	242.864.317	40,00	279.898.163
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		83,33		83,33		83,87		83,87		87,10		87,10	
	Jumlah				**4.088.155.728**		**4.358.081.112**		**4.400.722.936**		**4.455.708.514**		**4.528.161.618**		**4.635.461.552**
16	**Komunikasi dan Informatika**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah		80,00	3.764.280.000,00	85,00	4.012.821.101,04	90,00	4.052.084.714,14	95,00	4.102.714.172,53	100,00	4.169.427.328,60	100,00	4.268.226.646,17
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	70,00	359.999.319,00	71,89	383.768.705,74	73,84	387.523.706,42	75,84	392.365.686,97	77,89	398.745.842,21	80,00	408.194.577,97

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2,38	2,60	1.289.996.301,00	2,80	1.375.169.853,71	3,30	1.388.625.259,70	3,30	1.405.975.673,07	3,70	1.428.837.873,69	4,00	1.462.695.810,46
	Jumlah				**5.414.275.620**		**5.771.759.660**		**5.828.233.680**		**5.901.055.533**		**5.997.011.044**		**6.139.117.035**
17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.842.977.255,00		1.964.662.038,32		1.983.885.354,83		2.008.673.346,23		2.041.335.855,19		2.089.707.627,51
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	50,00	286.125.975,00	60,00	305.017.785,61	70,00	308.002.244,68	80,00	311.850.630,87	90,00	316.921.551,95	100,00	324.431.368,19
	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	60,00	329.999.450,20	65,00	351.788.059,63	73,75	355.230.144,36	82,50	359.668.627,54	91,25	365.517.104,49	100,00	374.178.447,56
		Pertumbuhan Wirausaha	N/A	4,50		5,00		5,75		6,50		7,25		8,00	
	Jumlah				**2.459.102.680**		**2.621.467.884**		**2.647.117.744**		**2.680.192.605**		**2.723.774.512**		**2.788.317.443**
18	**Penanaman Modal**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00
	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi (persen)	N/A	N/A	-	100%	150.000.000	100%	151.467.681	100%	153.360.220	100%	155.853.970	100%	159.547.107
	Program promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	N/A	1,00	14.999.992	10,00	15.990.384	12,50	16.146.843	15,00	16.348.592	17,50	16.614.433	20,00	17.008.131
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	100,00	91.996.874	100,00	98.071.078	100,00	99.030.658	100,00	100.268.014	100,00	101.898.446	100,00	104.313.045
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	100,00	-	100,00	69.419.687	100,00	102.615.125	100,00	145.419.821	100,00	201.822.486	100,00	285.352.409
	Program pengelolaan data dan sistem informasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	100,00	5.942.829	100,00	6.335.211	100,00	6.397.199	100,00	6.477.129	100,00	6.582.452	100,00	6.738.431

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	penanaman modal														
	Jumlah				**3.436.161.234**		**3.663.037.900**		**3.698.879.045**		**3.745.095.315**		**3.805.993.325**		**3.896.180.661**
19	**Kepemudaan dan Olahraga**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,33	66,00	1.507.102.500	66,60	1.546.610.750	67,10	1.561.743.626	67,60	1.581.257.096	68,00	1.606.969.502	68,70	1.645.048.470
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1,74	1,74	56.123.400	2,00	99.829.015	2,40	100.805.796	2,80	102.065.331	3,20	103.724.988	3,20	106.182.870
		Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,06	2,06		2,25		2,60		3,10		3,50		4,00	
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	30,00	30,00	609.556.000	32,00	669.802.666	32,00	676.356.378	33,00	684.807.227	34,00	695.942.697	35,00	712.433.850
		Peningkatan Prestasi Olahraga	2	2		3		3		3		3		4	
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0,00	5,00	124.150.000	10,00	132.347.153	15,00	133.642.109	20,00	135.311.923	30,00	137.512.194	35,00	140.770.702

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**2.296.931.900**		**2.448.589.583**		**2.472.547.909**		**2.503.441.577**		**2.544.149.382**		**2.604.435.892**
20	**Statistik**														
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,90	2,60	44.526.295,00	2,80	47.466.197,02	3,00	47.930.631,98	3,20	48.529.509,37	3,50	49.318.634,96	3,70	50.487.296,05
	Jumlah				**44.526.295**		**47.466.197**		**47.930.632**		**48.529.509**		**49.318.635**		**50.487.296**
21	**Persandian**														
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	N/A	20,00	39.994.554,00	40,00	42.635.242,39	60,00	43.052.408,67	80,00	43.590.334,28	80,00	44.299.145,24	80,00	45.348.863,82
	Jumlah				**39.994.554**		**42.635.242**		**43.052.409**		**43.590.334**		**44.299.145**		**45.348.864**
22	**Kebudayaan**														
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	10,00	1.203.460.567	15,00	1.282.920.494	16,25	1.295.473.282	17,50	1.311.659.793	18,75	1.332.988.348	20,00	1.364.575.021
	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	10,00	85.502.480	15,00	265.000.000	16,25	267.592.903	17,50	270.936.388	18,75	275.342.014	20,00	281.866.555
	Program pembinaan sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	10,00	-	15,00	205.000.000	16,25	207.005.831	17,50	209.592.300	18,75	213.000.426	20,00	218.047.713

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	13	13	526.508.474	30	611.271.827	30	617.252.842	30	624.965.212	30	635.127.607	30	650.177.677
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	10,00		15,00		16,25		17,50		18,75		20,00	
	Jumlah				**1.815.471.521**		**2.364.192.321**		**2.387.324.858**		**2.417.153.693**		**2.456.458.393**		**2.514.666.966**
23	**Perpustakaan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah	N/A	80,00	2.128.382.637,00	85,00	2.188.911.652,91	90,00	2.210.329.149,01	95,00	2.237.946.480,72	100,00	2.274.337.139,82	100,00	2.328.230.142,30
	Program pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00	70.795.000,00	85,00	105.469.324,77	88,75	106.501.293,72	92,50	107.831.992,16	96,25	109.585.419,82	100,00	112.182.170,85
	Jumlah				**2.199.177.637**		**2.294.380.978**		**2.316.830.443**		**2.345.778.473**		**2.383.922.560**		**2.440.412.313**
24	**Kearsipan**														
	Program pengelolaan arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan	N/A	C	29.999.900,00	CC	81.980.679,37	B	82.782.822,70	BB	83.817.166,69	A	85.180.095,60	A	87.198.534,74
	Jumlah				**29.999.900**		**81.980.679**		**82.782.823**		**83.817.167**		**85.180.096**		**87.198.535**
III	**Urusan Pilihan**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25	**Kelautanan dan Perikanan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	80	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4,498	52,192	199.999.811	54,213	213.205.038	57,234	215.291.152	60,757	217.981.144	66,833	221.525.678	73,516	226.774.980
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	650,16	880	199.999.010	898,579	213.204.184	915,068	215.290.290	932,181	217.980.271	952,852	221.524.790	980,606	226.774.072
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi (KMA^2)	0	0	-	1	100.000.000	1	129.613.156	1	167.798.589	1	218.114.568	1	292.630.371
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,5	0		46,5	93.227.309	51,4	94.139.496	56,6	95.315.738	62,2	96.865.642	68,4	99.160.983
	Jumlah				**3.326.523.619**		**3.546.161.330**		**3.580.858.891**		**3.625.600.539**		**3.684.555.476**		**3.771.865.204**
26	**Pariwisata**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelaksanaan urusan penunjang pemerintah Daerah (% realisasi anggaran)	88,97	100	2.517.966.090,00	100	2.517.966.090,00	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	11,41		399.897.433,19	2,30	426.301.141	2,30	430.472.302	2,30	435.850.911	2,30	442.938.168	2,30	453.434.091
	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	20,00		25,00	83.125.865	31,25	96.257.785	37,50	113.191.071	43,75	135.503.633	50,00	168.547.580
	Program Pengembangan Ekonomi Kretatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi yang memiliki Kekayaan Intelektual	N/A	0,43		0,44	83.125.865	0,46	96.257.785	0,47	113.191.071	0,48	135.503.633	0,5	168.547.580
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	35,00	49.999.770,00	40,00	53.301.065	48,75	53.822.591	57,50	54.495.087	66,25	55.381.217	75,00	56.693.538

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**2.967.863.293**		**3.163.820.026**		**3.194.776.553**		**3.234.694.230**		**3.287.292.742**		**3.365.188.878**
27	**Pertanian**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	N/A	100	7.350.694.811	100	7.835.802.865	100	7.912.472.601	100	8.011.336.329	100	8.141.606.562	100	8.334.531.179
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	5	599.972.608	5	639.586.519	5	645.844.580	5	653.914.194	5	664.547.321	5	680.294.524
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	10	418.769.819	10	446.419.598	10	450.787.609	10	456.420.051	10	463.841.778	10	474.833.036
	Program pengendalian kesehatan gewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner	N/A	5	80.036.862	5	85.321.392	5	86.156.222	5	87.232.716	5	88.651.184	5	90.751.875

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	N/A	5	49.998.374	5	53.299.577	5	53.821.088	5	54.493.565	5	55.379.671	5	56.691.955
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Pertanian	N/A	10	296.798.474	10	316.394.949	10	319.490.729	10	323.482.660	10	328.742.726	10	336.532.658
	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok	N/A	25	2.097.993.470	25	2.236.516.005	25	2.258.399.288	25	2.286.617.240	25	2.323.799.321	25	2.378.864.386
	Jumlah				**10.894.264.418**		**11.613.340.905**		**11.726.972.117**		**11.873.496.755**		**12.066.568.563**		**12.352.499.614**
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**														
	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	N/A	20,00		21,69		23,52	14.000.000,00	25,51	14.174.925,37	27,66	14.405.420,10	30,00	14.746.772,90
	Jumlah				**-**		**-**		**14.000.000**		**14.174.925**		**14.405.420**		**14.746.773**
30	**Perdagangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Persen)	60		2.648.515.814,00	70	2.823.387.246,66	75	2.824.012.795,29	80	2.859.297.901,21	85	2.905.792.192,33	90	2.974.648.239,69
	Program peningkatan	Persentase Sarana Perdagangan yang	N/A	10	29.051.972,00	15	30.970.163,29	15	31.273.192,13	20	31.663.940,32	20	32.178.819,32	20	32.941.333,01

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	sarana distribusi perdagangan	Ditingkatkan Kualitasnya													
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	N/A	5,9	229.044.231,00	5,9	244.167.151,02	5,9	246.556.214,55	5,9	249.636.852,91	5,9	253.696.132,11	5,9	259.707.750,20
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase tertib usaha perdagangan	N/A	75	29.051.834,00	75	30.970.016,18	80	31.273.043,58	85	31.663.789,91	90	32.178.666,47	100,00	32.941.176,53
	Jumlah				**2.935.663.851**		**3.129.494.577**		**3.133.115.246**		**3.172.262.484**		**3.223.845.810**		**3.300.238.499**
31	**Perindustrian**														
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A			20,00		55,00	13.000.000,00	70,00	13.162.430,70	85,00	13.376.461,52	100,00	13.693.431,98
	Program pengendalian izin Usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	75	16.553.200,00	75	17.646.144,88	80	17.818.804,31	85	18.041.444,38	90	18.334.811,56	100,00	18.769.275,75
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	100,00	8.316.900,00	100,00	8.866.033,30	100,00	8.952.783,36	100,00	9.064.645,43	100,00	9.212.043,25	100,00	9.430.333,08

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**24.870.100**		**26.512.178**		**39.771.588**		**40.268.521**		**40.923.316**		**41.893.041**
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**														
1	**Sekretariat Daerah**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah (%)	23.088.970.566,00	100	27.900.684.319	100	29.742.860.458	100	30.033.880.699	100	30.409.144.106	100	30.903.619.200	100	31.635.915.567
	Program pemerintahan dan kesejagteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.032.226.026,00	75,00	8.642.883.311	80,00	9.213.540.045	85,00	9.303.690.307	90,00	9.419.936.840	95,00	9.573.111.956	100,00	9.799.957.720
	Program perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.797.715.008,00	75,00	1.457.761.000	80,00	1.554.011.418	85,00	1.569.216.706	90,00	1.588.823.550	95,00	1.614.658.992	100,00	1.652.920.171
	Jumlah		**31.918.911.600**		**38.001.328.630**		**40.510.411.921**		**40.906.787.712**		**41.417.904.496**		**42.091.390.148**		**43.088.793.458**
2	**Sekretariat DPRD**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (%)	N/A	90	22.820.028.747	95	22.484.043.026	100	24.063.537.602	100	24.830.442.790	100	25.623.092.587	100	26.449.396.524

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Daerah Kabupaten/Kota														
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	N/A	87,50	4.912.334.386	90,00	7.079.382.639	92,50	5.789.152.617	95,00	5.395.246.920	97,50	5.094.089.114	100,00	4.995.663.696
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	N/A	83,00		85,00		88,75		92,50		96,25		100,00	
	Jumlah				**27.732.363.133**		**29.563.425.665**		**29.852.690.219**		**30.225.689.711**		**30.717.181.701**		**31.445.060.220**
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**														
1	**Perencanaan Pembangunan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Bappeda (%)	4.810.446.883,00	100	5.085.466.854,00	100	5.421.240.901,00	100	5.474.285.254	100	5.542.684.639	100	5.632.812.776	100	5.766.288.675
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	640.612.597,00	100,00	522.208.602	100,00	556.688.051	100,00	562.134.988	100,00	569.158.679	100,00	578.413.618	100,00	592.119.786
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan	330.558.791,00	100,00	380.997.924,00	100,00	406.153.768,00	100,00	410.127.797,00	100,00	415.252.208,00	100,00	422.004.515,00	100,00	432.004.391,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia													
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah		**5.781.618.271**		**5.988.673.380**		**6.384.082.720**		**6.446.548.039**		**6.527.095.526**		**6.633.230.909**		**6.790.412.852**
2	**Keuangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	21.572.721.442		21.941.446.621		22.599.690.020		23.277.680.720		23.976.011.142		24.695.291.476		25.436.150.220
	Program pengelolaan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang	N/A	35,00	216.968.385.838	30,00	231.985.745.067	27,50	233.732.579.088	25,00	236.186.482.595	22,50	239.649.920.482	20,00	245.150.472.125

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	keuangan Daerah	Dialokasikan melalui TKD													
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	37,00		40,00		42,50		45,00		47,50		50,00	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Persentase Penurunan SILPA	N/A	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program pengelolaan barang milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	5,00	1.088.665.986	5,00	1.121.325.966	5,00	1.154.965.745	5,00	1.189.614.717	5,00	1.225.303.158	5,00	1.262.062.253
	Program pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,34	7,49		7,64		7,79		7,94		8,10		8,26	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	100,00	2.089.567.858	100,00	2.152.254.894	100,00	2.216.822.541	100,00	2.283.327.217	100,00	2.351.827.033	100,00	2.422.381.844
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	70,00		75,00		81,25		87,50		93,75		100,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**242.088.066.303**		**257.859.015.947**		**260.382.048.094**		**263.635.435.671**		**267.922.342.149**		**274.271.066.442**
3	**Kepegawaian**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Memadai	N/A	100,00	4.804.002.779	100,00	5.121.192.823	100,00	5.171.301.345	100,00	5.235.915.045	100,00	5.321.054.883	100,00	5.447.143.323
	Program kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	87,00	907.751.090	90,00	967.686.444	92,50	977.154.812	95,00	989.364.038	97,50	1.005.451.827	100,00	1.029.277.150
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	60,00		65,00		73,75		82,50		91,25		100,00	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00	
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	85,00		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
	Jumlah				**5.711.753.869**		**6.088.879.268**		**6.148.456.157**		**6.225.279.083**		**6.326.506.709**		**6.476.420.474**
4	**Pendidikan dan Pelatihan**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	N/A	60,00	640.696.800	65,00	682.999.575	75,00	689.682.412	80,00	698.299.766	90,00	709.654.634	95,00	726.470.707
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
	Jumlah				**640.696.800**		**682.999.575**		**689.682.412**		**698.299.766**		**709.654.634**		**726.470.707**
5	**Penelitian dan Pengembangan**														
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	3.686.122.406	75,00	3.922.326.095	80,00	4.181.302.378	85,00	4.222.214.504	90,00	4.274.969.677	95,00	4.344.483.835	100,00	4.447.431.315

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		87,50		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalagan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00	
	Jumlah				**3.922.326.095**		**4.181.302.378**		**4.222.214.504**		**4.274.969.677**		**4.344.483.835**		**4.447.431.315**
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**														
1	**Inspektorat Daerah**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	100	100	6.387.873.756	100	6.809.640.781	100	6.876.269.991	100	6.962.186.711	100	7.075.396.998	100	7.243.056.568
	Program penyelenggaraan pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	N/A	100	1.813.998.690	100	1.933.770.129	100	1.952.691.182	100	1.977.089.413	100	2.009.238.344	100	2.056.849.529
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	II	469.999.244	III	501.031.508	III	505.933.871	III	512.255.347	III	520.584.997	III	532.920.850
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	II		III		III		III		III		III	
	Jumlah				**8.671.871.690**		**9.244.442.417**		**9.334.895.044**		**9.451.531.471**		**9.605.220.338**		**9.832.826.947**
VII	**Unsur Kewilayahan**														
1	**Kecamatan Pandan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pandan	7.852.120.015,00	100	8.120.996.705	100	8.655.195.250	100	8.739.901.933	100	8.849.129.107	100	8.993.054.989	100	9.206.203.037

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pandan	1.208.324.800,00	100	1.193.701.700	100	1.272.575.917	100	1.285.027.489	100	1.301.083.482	100	1.322.240.058	100	1.353.572.039
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pandan	4.033.783.712,00	100	400.000.000	100	4.264.104.796	100	4.305.827.105	100	4.359.626.991	100	4.430.517.738	100	4.535.503.890
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pandan	102.930.100,00	100	113.460.300	100	120.951.652	100	122.135.108	100	123.661.146	100	125.671.967	100	128.649.908
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Pandan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pandan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**13.197.158.627**		**9.828.158.705**		**14.314.827.615**		**14.454.891.635**		**14.635.500.726**		**14.873.484.752**		**15.225.928.874**
2	**Kecamatan Sarudik**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sarudik	3.245.673.215,00	100	3.160.861.700	100	3.366.561.384	100	3.399.530.996	100	3.442.044.495	100	3.498.063.458	100	3.581.025.134
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sarudik	69.376.778,00	100	67.371.228	100	71.819.494	100	72.522.214	100	73.428.356	100	74.622.355	100	76.390.616
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sarudik	799.998.302,00	100	799.899.808	100	852.714.258	100	861.057.676	100	871.816.307	100	885.992.682	100	906.987.286
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sarudik	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranyaPengawasan dan KoordinasiPemerintahan Desa dan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kelurahan di kecamatan Sarudik													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sarudik	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**4.115.048.295**		**4.028.132.736**		**4.294.095.136**		**4.336.110.886**		**4.390.289.158**		**4.461.678.495**		**4.567.403.036**
3	**Kecamatan Tukka**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tukka	3.068.339.823,00	100	3.165.863.470	100	3.372.893.402	100	3.405.915.185	100	3.448.495.958	100	3.504.603.565	100	3.587.696.521
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Tukka	367.712.720,00	100	368.952.066	100	393.312.568	100	397.160.951	100	402.123.346	100	408.662.168	100	418.345.882
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tukka	1.015.201.737,00	100	1.013.998.909	100	1.080.948.529	100	1.091.525.115	100	1.105.163.360	100	1.123.134.131	100	1.149.748.070

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tukka	59.999.699,00	100	62.838.473	100	66.987.458	100	67.642.900	100	68.488.075	100	69.601.742	100	71.251.034
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Tukka	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Tukka	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**4.511.253.979**		**4.611.652.918**		**4.916.141.957**		**4.964.244.151**		**5.026.270.739**		**5.108.001.606**		**5.229.041.507**
4	**Kecamatan Badiri**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Badiri	1.700.613.800,00	100	1.656.757.850	100	1.765.147.273	100	1.782.428.214	100	1.804.711.560	100	1.834.073.760	100	1.877.557.918

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Badiri	249.726.092,00	100	228.900.000	100	244.013.396	100	246.400.956	100	249.479.654	100	253.536.377	100	259.544.210
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Badiri	408.854.400,00	100	409.942.500	100	437.009.445	100	441.285.382	100	446.799.096	100	454.064.379	100	464.823.950
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Badiri	109.895.400,00	100	70.875.000	100	75.554.606	100	76.293.874	100	77.247.140	100	78.503.236	100	80.363.459
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Badiri	29.000.000,00	100	2.000.000	100	2.132.052	100	2.152.913	100	2.179.813	100	2.215.258	100	2.267.751
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Badiri	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**2.498.089.692**		**2.368.475.350**		**2.524.856.772**		**2.549.561.339**		**2.581.417.263**		**2.623.393.010**		**2.685.557.288**
5	**Kecamatan Pinangsori**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pinangsori	2.326.469.651,00	100	2.548.750.783	100	2.715.035.109	100	2.741.620.051	100	2.775.900.676	100	2.821.071.389	100	2.887.967.273
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pinangsori	388.119.600,00	100	352.470.000	100	375.744.386	100	379.420.872	100	384.161.611	100	390.408.362	100	399.659.531
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pinangsori	1.029.556.200,00	100	1.034.965.000	100	1.103.299.805	100	1.114.095.087	100	1.128.015.337	100	1.146.357.697	100	1.173.521.945
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pinangsori	81.167.100,00	100	23.984.330	100	25.567.924	100	25.818.094	100	26.140.683	100	26.565.749	100	27.195.255
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	N/A	0	-	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Pinangsori													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pinangsori	N/A	0	-	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
	Jumlah		**3.825.312.551**		**3.960.170.113**		**4.221.647.224**		**4.262.954.104**		**4.316.218.307**		**4.386.403.197**		**4.490.344.004**
6	**Kecamatan Lumut**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Lumut	1.123.798.838,00	100	1.144.606.054	100	1.218.180.041	100	1.230.118.943	100	1.245.513.861	100	1.265.799.356	100	1.295.841.302
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Lumut	137.864.136,00	100	132.056.061	100	140.775.220	100	142.152.641	100	143.928.791	100	146.269.180	100	149.735.194

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Lumut	199.998.829,00	100	199.997.697	100	213.202.784	100	215.288.876	100	217.978.839	100	221.523.336	100	226.772.583
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Lumut	56.080.974,00	100	69.041.112	100	73.599.634	100	74.319.772	100	75.248.373	100	76.471.967	100	78.284.058
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Lumut	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.517.742.777**		**1.545.700.924**		**1.647.757.679**		**1.663.880.232**		**1.684.669.864**		**1.712.063.839**		**1.752.633.137**
7	**Kecamatan Sibabangun**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sibabangun	1.672.663.549,00	100	1.749.139.739	100	1.862.628.787	100	1.880.873.324	100	1.904.399.204	100	1.935.398.660	100	1.981.307.522
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sibabangun	128.888.535,00	100	117.997.026	100	125.787.921	100	127.018.698	100	128.605.754	100	130.696.979	100	133.793.992
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sibabangun	219.494.781,00	100	217.494.148	100	231.854.459	100	234.123.049	100	237.048.339	100	240.902.920	100	246.611.388
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sibabangun	46.988.853,00	100	66.195.630	100	70.566.275	100	71.256.734	100	72.147.063	100	73.320.228	100	75.057.634
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranyaPengawasan dan KoordinasiPemerintahan Desa dan Kelurahan dikecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.068.035.718**		**2.150.826.543**		**2.292.837.442**		**2.315.271.805**		**2.344.200.360**		**2.382.318.787**		**2.438.770.536**
8	**Kecamatan Sukabangun**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sukabangun	578.237.299,00	100	440.651.432	100	465.745.971	100	470.342.219	100	476.268.969	100	484.078.496	100	495.644.071
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sukabangun	9.796.000,00	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sukabangun	7.907.880,00	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sukabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sukabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sukabangun	24.048.290,00	100	30.399.848	100	32.407.034	100	32.724.122		33.132.999		33.671.766	100	34.469.657
	Jumlah		**619.989.469**		**471.051.280**		**502.153.005**		**507.066.341**		**513.401.968**		**521.750.262**		**534.113.728**
9	**Kecamatan Tapian Nauli**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tapian Nauli	1.957.338.982	100	1.966.809.000	100	2.095.669.922	100	2.116.184.875	100	2.142.638.400	100	2.177.495.540	100	2.229.117.467

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Tapian Nauli	76.662.532	100	61.954.800	100	66.045.439	100	66.691.664	100	67.524.954	100	68.622.960	100	70.249.059
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tapian Nauli	209.854.793	100	206.123.800	100	219.733.371	100	221.883.361	100	224.655.720	100	228.308.788	100	233.718.824
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Tapian Nauli	77.863.245	100	56.999.300	100	60.762.747	100	61.357.282	100	62.123.921	100	63.134.102	100	64.630.136
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Tapian Nauli	28.620.924	100	24.638.000	100	26.264.753	100	26.521.742	100	26.853.122	100	27.289.774	100	27.936.436
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kecamatan Tapian Nauli													
	Jumlah		**2.350.340.476**		**2.316.524.900**		**2.469.476.232**		**2.493.638.924**		**2.524.796.117**		**2.565.851.164**		**2.626.651.922**
10	**Kecamatan Sitahuis**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sitahuis	1.574.343.959	100	1.586.906.219	100	1.689.683.605	100	1.706.235.952	100	1.727.579.796	100	1.755.704.038	100	1.797.354.832
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase LembagaKemasyarakatan yang aktif diKecamatan Sitahuis	62.466.642	100	3.897.488	100	4.154.824	100	4.195.477	100	4.247.898	100	4.316.972	100	4.419.268
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sitahuis	201.445.251	100	200.750.000	100	214.004.759	100	216.098.697	100	218.798.779	100	222.356.609	100	227.625.601
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sitahuis	59.993.250	100	55.918.264	100	59.610.334	100	60.193.594	100	60.945.693	100	61.936.715	100	63.404.375

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sitahuis	N/A	0	-	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sitahuis	N/A	0	-	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
	Jumlah		**1.898.249.102**		**1.847.471.971**		**1.969.453.522**		**1.988.723.720**		**2.013.572.166**		**2.046.314.334**		**2.094.804.076**
11	**Kecamatan Sorkam**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sorkam	1.658.804.950	100	1.725.851.000	100	1.837.802.381	100	1.855.804.003	100	1.879.016.650	100	1.909.603.367	100	1.954.900.981
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sorkam	262.111.200	100	247.423.200	100	263.759.613	100	266.340.380	100	269.668.215	100	274.053.219	100	280.547.221

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sorkam	803.515.700	100	800.000.000	100	852.820.959	100	861.165.421	100	871.925.398	100	886.103.547	100	907.100.778
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sorkam	63.466.400	100	62.889.240	100	67.041.577	100	67.697.548	100	68.543.407	100	69.657.973	100	71.308.598
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sorkam	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sorkam	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.787.898.250**		**2.836.163.440**		**3.023.424.530**		**3.053.007.352**		**3.091.153.670**		**3.141.418.106**		**3.215.857.578**
12	**Kecamatan Sorkam Barat**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sorkam Barat	1.130.373.437	100	1.303.454.540	100	1.387.516.689	100	1.401.112.472	100	1.418.643.898	100	1.441.744.615	100	1.475.955.784
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sorkam Barat	170.997.144	100	25.005.636	100	26.656.663	100	26.917.486	100	27.253.811	100	27.696.978	100	28.353.289
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sorkam Barat	404.994.679	100	410.433.784	100	437.533.166	100	441.814.228	100	447.334.550	100	454.608.540	100	465.381.006
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sorkam Barat	66.040.896	100	65.145.426	100	69.446.731	100	70.126.235	100	71.002.439	100	72.156.991	100	73.866.833
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sorkam Barat	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentasePenyelenggaraanKetenteramandanKetertiban Umum yangdapat diselesaikan di Kecamatan Sorkam Barat	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.772.406.156**		**1.804.039.386**		**1.923.153.249**		**1.941.970.421**		**1.966.234.698**		**1.998.207.124**		**2.045.556.912**
13															**Kecamatan Kolang**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kolang	1.747.825.190	100	2.017.358.200	100	2.147.556.694	100	2.168.598.904	100	2.195.732.314	100	2.231.485.322	100	2.284.433.991
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Kolang	424.999.000	100	409.999.900	100	437.070.635	100	441.347.170	100	446.861.657	100	454.127.957	100	464.889.035
	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	39.410.800	100	90.033.369	100	95.977.930	100	96.917.030	100	98.127.976	100	99.723.609	100	102.086.673

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemerintahan Umum	umum di kecamatan Kolang													
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.212.234.990**		**2.517.391.469**		**2.683.605.259**		**2.709.863.104**		**2.743.721.947**		**2.788.336.888**		**2.854.409.699**
14	**Kecamatan Pasaribu Tobing**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pasaributobing	707.241.150	100	801.427.950	100	852.343.191	100	860.702.547	100	871.481.730	100	885.685.187	100	906.719.896
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang	3.000.000	100	2.857.500	100	3.046.169	100	3.075.975	100	3.114.408	100	3.165.051	100	3.240.050

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan pelayanan Publik	aktif di Kecamatan Pasaributobing													
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pasaributobing	2.500.000	100	5.155.000	100	5.495.365	100	5.549.134	100	5.618.469	100	5.709.829	100	5.845.130
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pasaributobing	34.161.900	100	20.492.500	100	21.845.541	100	22.059.290	100	22.334.914	100	22.698.096	100	23.235.953
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Pasaributobing	1.560.000	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pasaributobing	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**748.463.050**		**829.932.950**		**884.730.266**		**893.386.946**		**904.549.521**		**919.258.163**		**941.041.029**
15	**Kecamatan Barus**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Barus	1.655.602.319	100	1.660.232.540	100	1.768.851.384	100	1.786.168.568	100	1.808.498.648	100	1.837.922.429	100	1.881.497.786
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Barus	116.374.335	100	19.999.945	100	21.320.465	100	21.529.076	100	21.798.075	100	22.152.527	100	22.677.457
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasaranapublik yang terbangun di Kecamatan Barus	421.670.106	100	420.099.884	100	447.837.482	100	452.219.366	100	457.869.698	100	465.314.997	100	476.341.164
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Barus	139.497.578	100	36.999.895	100	39.442.857	100	39.828.787	100	40.326.435	100	40.982.172	100	41.953.291
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	2.999.943,00	100	1.212.786	100	1.292.861	100	1.305.511	100	1.321.823	100	1.343.317	100	1.375.148

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Barus													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Barus	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.333.144.338**		**2.138.545.050**		**2.279.745.049**		**2.302.051.308**		**2.330.814.679**		**2.368.715.442**		**2.424.844.846**
16	**Kecamatan Sosorgadong**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sosorgadong	1.079.561.548	100	1.212.595.785	100	1.290.658.875	100	1.303.306.949	100	1.319.616.328	100	1.341.106.783	100	1.372.933.225
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sosorgadong	121.673.900	100	116.533.200	100	124.227.444	100	125.442.952	100	127.010.321	100	129.075.602	100	132.134.195
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sosorgadong	200.000.270	100	200.000.000	100	213.205.239	100	215.291.355	100	217.981.349	100	221.525.886	100	226.775.194

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sosorgadong	82.236.000	100	57.994.419	100	61.828.900	100	62.433.867	100	63.213.958	100	64.241.863	100	65.764.147
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sosorgadong	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sosorgadong	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.483.471.718**		**1.587.123.404**		**1.691.920.458**		**1.708.475.123**		**1.729.821.956**		**1.757.950.134**		**1.799.606.761**
17	**Kecamatan Barus Utara**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Barus Utara	726.976.569	100	672.197.855	100	713.580.524	100	720.591.936	100	729.632.978	100	741.546.130	100	759.188.996

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Barus Utara	5.043.700	100	5.088.072	100	5.424.018	100	5.477.089	100	5.545.524	100	5.635.698	100	5.769.242
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Barus Utara	95.963.195	100	68.160.122	100	72.660.475	100	73.371.425	100	74.288.176	100	75.496.157	100	77.285.124
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentasePenyelenggaraanKetenteramandanKetertiban Umum yangdapat diselesaikan di Kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**827.983.464**		**745.446.049**		**794.665.017**		**802.440.450**		**812.466.678**		**825.677.985**		**845.243.362**
18	**Kecamatan Andam Dewi**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Andam Dewi	994.945.098	100	942.047.200	100	1.002.246.996	100	1.012.073.092	100	1.024.743.600	100	1.041.439.207	100	1.066.164.685
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Andam Dewi	63.834.063	100	49.000.000	100	52.235.283	100	52.746.382	100	53.405.430	100	54.273.842	100	55.559.922
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Andam Dewi	199.999.776	100	199.999.800	100	213.205.026	100	215.291.139	100	217.981.131	100	221.525.665	100	226.774.967
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Andam Dewi	81.600.310	100	60.690.500	100	64.697.663	100	65.330.699	100	66.146.985	100	67.222.584	100	68.815.499

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tePersentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Andam Dewirselenggaranya	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Andam Dewi	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.340.379.247**		**1.251.737.500**		**1.334.384.968**		**1.347.441.312**		**1.364.277.146**		**1.386.461.298**		**1.419.315.073**
19	**Kecamatan Sirandorung**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sirandorung	1.451.344.273	100	1.472.200.560	100	1.568.404.367	100	1.583.760.268	100	1.603.561.324	100	1.629.652.674	100	1.668.292.841
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di	132.000.000	100	161.999.970	100	172.696.212	100	174.385.965	100	176.564.860	100	179.435.935	100	183.687.873

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan pelayanan Publik	Kecamatan Sirandorung													
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sirandorung	199.999.845	100	199.999.754	100	213.204.977	100	215.291.090	100	217.981.081	100	221.525.614	100	226.774.915
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sirandorung	103.870.207	100	22.266.146	100	23.736.294	100	23.968.543	100	24.268.022	100	24.662.638	100	25.247.047
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sirandorung	N/A	100	3.499.857	100	3.730.939	100	3.767.444	100	3.814.517	100	3.876.544	100	3.968.403
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sirandorung	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**1.887.214.325**		**1.859.966.287**		**1.982.772.789**		**2.002.173.310**		**2.027.189.804**		**2.060.153.405**		**2.108.971.079**
20	**Kecamatan Manduamas**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Manduamas	1.718.293.257	100	1.559.804.111	100	1.660.792.047	100	1.677.061.705	100	1.698.041.025	100	1.725.684.945	100	1.766.624.403
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Manduamas	255.807.156	100	227.745.687	100	242.782.869	100	245.158.388	100	248.221.561	100	252.257.826	100	258.235.362
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Manduamas	605.950.401	100	602.999.873	100	642.813.662	100	649.103.299	100	657.213.630	100	667.900.408	100	683.727.067
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Manduamas	75.689.834	100	44.999.822	100	47.970.989	100	48.440.363	100	49.045.609	100	49.843.127	100	51.024.216
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Manduamas													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Manduamas	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.655.740.648**		**2.435.549.493**		**2.596.359.567**		**2.621.763.755**		**2.654.521.825**		**2.697.686.306**		**2.761.611.048**
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**														
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keteresediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	N/A	100	2.218.006.850	100	2.364.453.412	100	2.387.588.504	100	2.417.420.632	100	2.456.729.674	100	2.514.944.674
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	75,00	418.686.100	80,00	446.330.352	85,00	450.697.490	90,00	456.328.806	95,00	463.749.048	100,00	474.738.109

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	60,00	909.842.250	65,00	969.915.676	74,00	979.405.855	83,00	991.643.208	91,00	1.007.768.057	100,00	1.031.648.266
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	85,00	70.000.000	90,00	74.621.834	93,00	75.351.974	95,00	76.293.472	98,00	77.534.060	100,00	79.371.318
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaggunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penggayat Kepercayaan di	N/A	75,00	-		193.833.313	85,00	195.729.883	90,00	198.175.463	95,00	201.397.942	100,00	206.170.295

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Daerah yang Dilaksanakan													
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	N/A	75,00	899.999.800		765.590.053	85,00	773.081.000	90,00	782.740.392	95,00	795.468.327	100,00	814.317.853
	Jumlah				**4.516.535.000**		**4.814.744.639**		**4.861.854.706**		**4.922.601.973**		**5.002.647.109**		**5.121.190.516**
	TOTAL				**1.222.742.535.503**		**1.307.169.513.560**		**1.319.959.567.426**		**1.336.452.025.684**		**1.358.183.720.560**		**1.390.367.426.895**

Tabel 4.2 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah Terhadap PHTC Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi			
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 200	2025	Melakukan *Launching* UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		33 Kabupaten/Kota		Kemensos setiap bulannya), Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya Dinas Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota)
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota			
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Tidak ada	Dinas TPH	Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)	Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
				PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan) BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total *Solar Dry Dome*: 70
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung. Penyusunan *roadmap* dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: Pemerintah Prov. Sumatera Utara. Identifikasi Penetapan Lokasi Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. Integrasi Sistem (Layanan).	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. Penentuan lokasi Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pemetaan Lokasi Strategis. Koordinasi kepada *Stakeholder* dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: - 33 Kabupaten/Kota			Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Integrasi Sistem (Layanan). Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi
		Tidak ada			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Integrasi Sistem (Layanan). Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kabupaten			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi
		Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: 25 Kabupaten			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Evaluasi dan Monitoring Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi pggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: 33 Kabupaten/Kota			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. Penentuan lokasi
		Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 Kabupaten/Kota			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
	2025	Tidak ada	Dinas PUPR		

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2026	Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.		OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjungbalai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba,Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjungbalai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab.Pakpak Bharat			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. Digitalisasi sistem irigasi (*smart irrigation*) berbasis sensor dan aplikasi. Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kabupaten Langkat (DI. Secanggang), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Balakka Sitongkon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI.Sigorbus), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Maligas), Kabupaten Simalungun (DI. Javaconisasi), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Aek Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Hasak I dan II), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Mombangboru), Kabupaten Samosir (DI. Tele Harian Boho), Kabupaten Humbang Hasundutan (DI. Parmiahan/Hutapaung), Kabupaten Nias (DI. Gido Zebua), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Tongguran I), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Hombang/Tongah Mangaraja), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI. Padang Garugur), Tapanuli Tengah Utara (DI. Napa Tanjung Beringin), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Cinta Makmur), Kabupaten Asahan (DI. Serbangan), Kabupaten Batubara			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		(DI.Simodong), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI.Padang Garugur), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Deli Serdang (DI. Namorambe), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus).			
	2028	Penguatan jaringan teknis Kabupaten Batubara (DI. Simodong, DI. Purwodadi, DI. Sei Balai, DI. Suka Makmur, DI. Sijambi), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Horas Hulu/Tongah), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI. Padang Garugur), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Sigorbus), Kabupaten Labuhanbatu (DI. Cinta Makmur, DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Mombangboru), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga), Kabupaten Langkat (DI. Gebang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Pandurungan/Sitandiang), Kabupaten Karo (DI. Parit Lompaten), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Simok Mok ,DI. Aek Sarulla), Kabupaten Deli Serdang (DI. Medan Krio), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri, Kabupaten Mandaling Natal (DI. Siulang Aling), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Badiri Lopian)			
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran Kabupaten Batu Bara (DI.Simodong), Kabupaten Tapanuli Selatan (DI.Sipirok			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Komplek), Kabupaten Labuhanbatu (DI. Cinta Makmur, D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Utara - DI.Simok Mok, Kabupaten Mandailing Natal - DI.Tapus, Kabupaten Dairi - DI. Buluh Duri, Kabupaten Mandailing Natal - DI. Siulang-Aling, Kabupaten Tapanuli Tengah - DI Mombangboru, Kabupaten Tapanuli Tengah – DI. Pandurungan/Sitandiang, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Badiri Lopian, Kabupaten Toba - D.I Sijambur, Kabupaten Simalungun - D.I. Naga Sompah, Kabupaten Karo - DI.Parit Lompaten			
	2030	Kabupaten Dairi - D.I. Siulang-Aling, Kabupaten Tapanuli Selatan - D.I.Sipirok Komplek, Kabupaten Toba - D.I.Simangatasi II, Kabupaten Labuhanbatu - D.I.R Cinta Makmur, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Badiri Lopian,Kota Pematangsiantar/Simalungun - DI. Rambung Merah, Kota Pematangsiantar - DI. Sibatu-Batu, Kabupaten Simalungun - (DI. Panombean Pane,D.I. Naga Sompah), Kabupaten Deli Serdang - (D.I.R Sisir Gunting,D.I.R Percut, D.I Namorambe)			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta	2025	Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain)	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan	Bupati/Wali Kota: Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = *by name by address*)

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah		Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah Launching Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN Pembangunan Fisik setiap Tahun Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan		(sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal.
	2026	Tidak ada			
	2027	Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah Pembangunan Fisik setiap Tahun Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan			Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui *Restorative Justice* (PRESTICE).	2025	Tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota Edukasi dan sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah, Toba) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2027	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2029	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2030	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel 4.3 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah erhadap Program Prioritas dan proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Penyediaan lahan/hibah lahanyang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026- 2029	Dinas Pendidikan	PUPR (Apraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan
		Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)			
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota			
		Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030	Tidak ada			
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	1.Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. 2.Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan,			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru			
	2027	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 14 Kabupaten/Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029-2030	tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BLK ke industri lokal. Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan	1.Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2.Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. Mengintegrasikan *teaching factory* di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk *m*enciptakan ekosistem pelatihan *dual system*. Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui *E-commerce* dan *platform* digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, *event* pariwisata, serta *platform* pemasaran digital. Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja.	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				administrasi, maupun pengelola program pelatihan. Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit- unit pelatihan. BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis *output* dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	1.Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli 2.Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara			
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara			
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 Provinsi Sumatera Utara			
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan *Legacy* & Keberlanjutan Tahun 2030 Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota a memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2028	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2029	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e- Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 *Launching* Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2025 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	1.Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota 2.Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Tidak ada			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah 2.Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat 3.Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 RSUD Kabupaten Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kabupaten			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kabupaten Simalungun, RSUD Salak di Kabupaten Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, RSUD Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, RSUD Dr. FL Tobing Kota Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang			4.Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD 5.Surat Penugasan & dukungan 6.Legal Formal penyediaan Akomodasi dokter residen
	2029	Tidak ada			
	2030	Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas 2.Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas 3.Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	Tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas)	1.Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. 2.Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. 3.Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
	2026	Tidak ada			
	2027	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Dairi		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
	2028	Tidak ada			
	2029	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 Sebanyak 650 KK (130KUBE) di 5 Kabupaten/Kota: Padangsidimpuan, Simalungun, Langkat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai serta 700 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Toba, Deli Serdang, Dairi, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/BUMEDes, Pemerintah Kabupaten/Kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok Dinas Perhubungan : Transportasi logistik Dinas Sosial : Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1.Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2.Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3.Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 4.Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 5.Monitoring dan evaluasi
		Tidak ada			
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Tengah (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir),			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Tapanuli Tengah (rawan logistik), Tapanuli Tengah Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbang Hasundutan (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Tapanuli Tengah (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		(akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Medan (kota IHK utama), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (wilayah tertutup distribusi), Deli Serdang (wilayah distribusi padat), Toba (akses perbatasan dan pariwisata), Humbang Hasundutan (wilayah pertanian dan pengunungan), Nias Selatan (terpencil), Karo (akses dan cuaca ekstrem), Langkat (wilayah perbatasan), Simalungun (pusat distribusi regional), Tapanuli Selatan (wilayah pegunungan), Mandailing Natal (akses rendah), Dairi (hinterland), Nias Barat (wilayah terpencil), Tapanuli Tengah (rawan distribusi)			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Tengah (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Medan (pusat IHK), Tebing Tinggi (akses perdagangan), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (akses logistik terbatas), Gunungsitoli (pulau terluar),			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Dairi (wilayah perbatasan), Tapanuli Tengah (kontributor inflasi lokal), Toba (pariwisata dan pertanian), Mandailing Natal (daerah rawan Kemiskinan), Nias Barat (akses sulit), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Humbang Hasundutan (akses dataran tinggi), Langkat (wilayah distribusi utama), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga Medan)			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	Pendataan dan verifikasi Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	Dinas Sosial Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2.Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu	3.Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.	
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. BPJS Ketenagakerjaan	
	2030	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara		BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen apraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja 2.Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen apraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan) 3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai) 4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2.PS Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan) 3.PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Tengah) 4.PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4.PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5.PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi	2025	KEK Pertanian tidak ada		Bappelitbang: Menyelaraskan rencana	2025: Dukungan kab/kota untuk Pengembangan KEK

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Khusus Pertanian dan pariwisata		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan *Capacity Building* Pariwisata dan Pertanian Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian DInas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub DPMPTSP: fasilitasi perizinan	Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi Penetapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2028: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian Penyediaan Lahan Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2029: • Peningkatan SDM Pariwisata Penyediaan Lahan
	2026	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2027	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2028	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2029	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2030	KEK Pertanian tidak ada KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota Promosi Investasi 2030: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian Penyediaan Lahan Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota Promosi Investasi
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, *capacity building* bagi petani Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian	Dukungan Kabupaten/Kota: 1.Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi) 2.Peningkatan *capacity building* pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); 3.menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. 4.Pemasaran, dukungan promosi, *capacity building* diversifikasi produk hilirisasi ,
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, *capacity building* bagi petani Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota 5.Menentukan IKM yang akan dilakukan *capacity building*, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi *capacity building* standarisasi ekspor bagi pelaku IKM. 6. Dukungan pembiayaan KUR, identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan *business matching*. *7.Branding* Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	Tidak ada	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: percepatan fasilitasi regulasi Biro Pemotda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	-
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui	2025	Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
kerja sama ekonomi		Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan *coconut milk*, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan Diskominfo: untuk publikasi media	1. Dukungan data CPCL di lokas intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
20. Pengembangan Kawasan Unggulan	2025	Kajian kampung nelayan dan budidaya	DISKANLA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera
	2026	Pembuatan *master plan*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Perikanan Tangkap dan Budidaya		Pembangunan sarana prasana produksi Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, *automatic feeder* Perikanan tangkap: kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga, kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.		dan ekspor produk perikanan. Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota 2.Klasterisasi 3.Sosialisasi dan Edukasi 4.Replikasi di daerah yang sama
	2027	Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk *coolbox* dan gudang ikan Kemitraan usaha dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/ pembudidaya.			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga, kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.			
		Sertifikasi mutu Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan Pembukaan akses pasar ekspor			
	2028	Kawasan perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah-Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan- Tanjungbalai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku) Kawasan perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang (Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami).			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
21. Pengawasan Konservasi Laut	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan	DISKANLA		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)		pelanggaran, *draft* rencana aksi		BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan Nelayan kab/kota 2.Klasterisasi 3.Sosialisasi dan Edukasi
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2030	Buku capaian dan film dokumenter Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	Tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa -Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan Penyediaan Regulasi Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan *stakeholder* terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1.Kolaborasi *Multistakeholder* dalam kegiatan 2.Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	TPH: Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS. Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1.Data Kelompok Tani (CPCL) 2.data penentuan lokasi pengadaan lahan 3.Data produksi pertanian; kondisi air 4.Data *readiness criteria*
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada		Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
	2030	Tidak ada			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai	2025	Tidak ada	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar	1.Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. 2.Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes).
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Merah, dan bawang merah	2030	Tidak ada	Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri	3.Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. 4.Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. 5.Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. 6.Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. 7.Replikasi di daerah yang sama
				pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. Diskominfo (Publikasi)	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil Produksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
26. Program Pengembangan	2025	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Bibit Unggul Pertanian	2028	Tidak ada	sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya , mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi		menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2029	Tidak ada			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. 33 Kabupaten/Kota	seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo	
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan *e- commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya 33 Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. 33 Kabupaten/Kota		dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. 33 Kabupaten/Kota			
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
28. Dukungan terhadap	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media	-Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam
	2026	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2027	Tidak ada		DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi	Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di darah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN ke dalam renja OPD -Menyusun rencana aksi tahunan -Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba -Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik) -Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; -Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; -Pendampingan Desa Wisata; -Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; -Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*));
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang	-Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata -Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
				& Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh OPD Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencana Aksi yang disusun	
29. Pengelolaan dan Penataan	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional	Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing- masing Kabupaten;
Kawasan Toba Caldera UGGp dan	2026	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Kawasan Geopark lainnya	2027	Tidak ada		BP TCUGGp; Pembangunan *Visibilities di Geosite*; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan *Cultural Heritage* di Kawasan *Geopark*; Melaksanakan *Event Geofest*. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan *Geosite*; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanaan kegiatan *Geopark* *to School* dan edukasi terkait *Geopark* kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar *Geosite*;	Penyusunan muatan Lokal; -Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang *Geopark*; -Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; -Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi *Geological Heritage, Biological/Natural Heritage* dan *Cultural Heritage;* -Rutin melaksanaan *Event GeoFest*; -Menyusun kajian awal terkait Kawasan *Geopark* baru;
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			-Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; -Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; -Pendampingan Desa Wisata; -Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				5.Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait *Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage* di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa *Travel Agent*); -Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	Inventarisasi & Identifikasi SDM Kawasan (BUMDES/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM); Penyusunan Regulasi Penetapan Kawasan Strategis; Penyusunan *Masterplan* Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak Bharat.	DISBUDPAREKRAF	Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2.Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik);

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Penataan Kawasan, Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan bagi BUMDes/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM dan Peningkatan Aksesibiltas Kawasan Strategis SIBANDAN		Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	3.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5.Pendampingan Desa Wisata; Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 6.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); 7.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 8.Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 9.Pendampingan kepada pelaku UMKM; 10.Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya (fisik & nonfisik) Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli	DISBUDPAREKRAF	Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di kawasan.	1.Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi;

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Tengah, Langkat & Tapanuli Tengah Utara		Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	2.Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik); 3.Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4.Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5.Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6.Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9.Pendampingan Desa Wisata; 10.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata;
	2026	Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (*masterplan*, DED, *roadmap*); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Tapanuli Tengah Utara			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					11.Pendataan dan Pendampingan UMKM; 12.Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban Penyelenggaraan acara Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan	1.Pelaksanaan *Side Event* saat pelaksanaan *Event* Internasional; 2.Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3.Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & *Homestay*),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan *Travel Agent*); 4.Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5.Memastikan kelancaran aksesibiltas terutama saat pelaksanaan *Event* internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
	2026	Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2027	Penyelenggaraan *event* tematik baru (kuliner, minat khusus, budaya), dan Diversifikasi wisata minat khusus (*geo tourism, wellness, heritage*, *agro*, religi); Penyusunan *Calender*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		of Event dan Penyelenggaraan *Event* Internasional Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)		Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan *event* (*sport, e- sport*, dsb)	
	2028	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional. Melaksanakan kerja sama Sponshorship dalam mendukung pelaksaan event; Pendataan, Inventarsasi dan penyusunan kajian awal terkait *event* tematik; Bersama dengan ASITA menyusun Paket-paket wisata; Melaksanakan kerja sama dengan influencer untuk mempromosikan pariwisata SUMUT; Melaksanakan kerja sama dengan *platform* pariwisata (traveloka, booking.com, tiket.com,dll).			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2029	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global			
		Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2030	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora &			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. Dinas Perindag ESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM	1.Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2.Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3.Fasilitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4.Pelaksanaan *Event* Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi *Platform e-commerce* yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan UMKM binaan kab/kota 2.Kurasi Produk UMKM 3.Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri 4.*Capacity Building*
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan *platform* logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan *Platform*; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2027	*Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce; PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan *Platform*; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2028	Pengembangan *E-commerce* menjadi Market Place;			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce; PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional *platform e- commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e- commerce; PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di *event* internasional (*virtual expo, marketplace* ASEAN), Manajemen Operasional *platform e-commerce* dan Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce* ; PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 Sosialisasi SK Tim forum dan *milestone* TPB SDGs 2025-2030	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se- Sumut tahun 2025-2030 Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs :

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Penyusunan skema *Declaration and Registration System* Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs *Workshop E-Monev* dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota Menyusun *draf Monev* capaian SDGs tahun			1.identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 2.Dukungan pelaksanaan *North Sumatera SDGs Action Awards* 3.Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota 4.Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		2025			
	2026	Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs*			
		Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum)			
		Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025			
		Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs			
		Launching Aplikasi e-Monev			
		Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs*			
		Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030			
		Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)			
		Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota			
		Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun			
		2026			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		11. Sosialisasi *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			
	2027	Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 Forum *Business Registration System* (BRS) *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) *North Sumatra SDGs Action Award 2028* *Launching* aplikasi e-Monev SDGs Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 Pelaksanaan Skema BRS Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA *Launching* integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) *North Sumatra SDGs Action Award 2029* Pelaksanaan Skema BRS Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 *North Sumatra SDGs Action Award 2030* Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota: Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
		Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA *Reborn*) Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD *Launching* SADAINA *Reborn* di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) *Updating* SK Tim Pelaksana SADAINA *Reborn* Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu Data tingkat Daerah Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu Data tingkat Daerah Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs Proses bisnis integrasi SADAINA *Reborn* dengan Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Pengembangan fitur SADAINA (API) Peningkatan kapasitas user SADAINA *Reborn* Pemanfaatan dan replikasi SADAINA *Reborn*			
	2029	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Menyediakan API (*Application Programming Interface*) Peningkatan kapasitas user SADAINA *Reborn* Pemanfaatan dan replikasi SADAINA *Reborn*			
	2030	Menyediakan API (*Application Programming Interface*) Pemanfaatan SADAINA *Reborn*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	-Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan -Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. -Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
	2025	Tidak ada	Dinas PUPR		-Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. -Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan				Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. -Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. -Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal. -Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta *Commuter*	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL,	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1.Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2.Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3.Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan Monitoring: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	Penetapan lokasi banjir Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) dan pemenuhan *readiness criteria* Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun pada Sungai Aek Natas, Sungai Kualuh, Sungai Aek Sirahar, Sungai Bah Lombut sepanjang 1.490 meter	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Pengerjaan fisik Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) dan pemenuhan *readiness criteria* Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sungai Suka, Sungai Humanga, Sungai Aek Sirahar sepanjang 648 meter			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2030	Tidak ada			pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota) Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)
	2025	tidak ada		PUPR:	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
43. Pembangunan TPST Regional	2026	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	-Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah Penyediaan dan penentuan lokasi Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan Dukungan SDM
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
44. Pembangunan PLTSa	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	PUPR : Pembangunan TPST LHK: Pengelolaan Sampah Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, 2.Penerapan Sistem
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					Persampahan Terpilah 3.Perizinan 4.Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 5.Penyediaan dan penentuan lokasi 6.Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 7.Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 8.Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 9.Dukungan SDM
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 1.Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 2.Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 3.Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 4.Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 5.Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim *appraisal* dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	Dukungan terhadap pengadaan lahan Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan *Design* Dasar (*Design* Vegetasi dan *Design* Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
	2030	Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan *Master Plan* Desa Produktif dan Mandiri.	2025	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola	1.Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES.

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				BUMDES/Masyarakat Desa).	2.Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. 3.Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
	2027	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2028	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2030	Tidak ada			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN, DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -*Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		-Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Festival Bunga dan Buah, Pemetaan *Event* Budaya Potensial yang sudah dilaksanakan 3 tahun untuk ditingkatkan menjadi kalender *event* nasional (KEMENPAR) dan kalender *event* budaya (KEMENDIKBUD). Penyusunan *Calender of Event* 2026 Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan, Sipirok - Padangsidimpuan, Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak	DISBUDPAREKRAF	Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat *event* internasional dilaksanakan Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan *event* internasional Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra *event*-*event*-pasca *event* internasional; publikasi kegiatan Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara	1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2.Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3.Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4.Memastikan kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5.Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya; 6.Penyusunan Kalender Budaya
	2026	Penyelenggaraan Event Budaya yang telah dilaksanakan 3 Tahun berturut untuk dinaikkan ke KhariSMA *Event* Nasional (KEN), Sinkronisasi *travel*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pattern dan *travel package* dengan CoE Provinsi dan Nasional (KEN), Koordinasi dengan Ashita, *Travel*, penguatan sektor promosi, medsos, online, *influencer*. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan event. Rekomendasi Tema 2026 "Festival Bahari Pesisir Barat" → parade perahu hias, lomba layar tradisional, kuliner laut, tari dan musik pesisir. Waktu pelaksanaan pada musim libur anak sekolah, libur musim panas dan libur musim dingin Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga – Pandan dan Sipirok - Padangsidimpuan			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan	2025	Tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi
	2026	Tidak ada			
	2027	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat		Sumatera Utara di Tahun 2027 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027 Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan		edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	Tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	Tidak ada		Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)	2.Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota) 3.Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Tabel 4.4 Keselarasan Program Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan	8	1
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	2	Peningkatan Kesempatan Kerja	15	1
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	3	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata	7	3
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah.	4	Peningkatan Ekonomi Rakyat	14	4, 9
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	5	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	15	5, 7, 8, 13

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	6	Peningkatan Kemandirian Daerah	12	4, 10
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).	7	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	2, 3, 4	10, 11
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.	8	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.	8	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat	16	16, 17
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	9	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	9	Peningkatan Budaya dan Olahraga	17	16
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	10	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	10	2
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	11	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	13, 14	12, 13

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	12	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	12	Peningkatan Ketahanan Daerah	9	15
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	13	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	13	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	11	14
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	14	Pengembangan Desa dan Perencanaan Pembangunan	12, 14	15
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.	15	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6, 16	17
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	16	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	16	Penguatan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	1, 12	6
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.				

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, dengan ukuran kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Indikator merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, atau tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (impact). Dampak (*impact*) mengacu pada kondisi yang ingin diubah sebagai hasil dari pembangunan atau layanan yang diperoleh melalui pencapaian hasil (outcome) dari beberapa program. Sementara itu, hasil (outcome) adalah kondisi yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu, yang mencerminkan keberhasilan keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,34	74,55 – 76,76	74,91-77,16	75,27-77,56	75,63-77,96	75,99-78,36	76,35-78,76
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
3	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,62	35,40	40,78	46,97	54,10	70,19	80,85
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
5	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	2,26	2,30	2,36	2,41	2,47	2,53	2,60
6	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
7	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
9	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,27	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67
11	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00

Tabel 4.6 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan RPMJD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,93-72,11	72-94-73,10
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak		
	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Kasus Kematian Ibu (Kasus)	4,00	4,00
	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	29,25	17,05
3	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)		
	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90,00	90,00
	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment	90,00	90,00

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
							success rate) (%)		
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,60	98,60
5	Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran:		
	a Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-			
	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30			
	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09			
	b Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	b Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi SD	53,81	57,50
							- Literasi SMP	62,39	63,80

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi SD	53,81	56,50
							- Numerasi SMP	62,39	65,50
	c Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,30-10,33	10,83-10,84	c Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	10,83-10,84	b Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,17-9,52	9,68-10,10
	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	c Harapan Lama Sekolah	13,59-13,79	13,86-14,10
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	55,21	64,25
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10,20 – 9,53	8,28-7,54
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	39,68	39,68
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		

No	RPJMN Tahun 2025-2029				RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029				RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029			
		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
11	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	11,61 – 11,80	13,43-13,66
	b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
12	Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata			
	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,32-1,39	1,46-1,51
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b	Wisatawan Mancanegara (Jiwa)		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		5,45	5,43				
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a	Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	70,00	90,00

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,50	3,97
	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,07	0,20
	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	6,25	9,04
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,65-7,49	7,19-7,17
	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67.00-69.50	71.00-73.50
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	27,66
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Masyarakat Digital	41,25	47,07
20	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,00	17,99
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00-3,00	1,51-3,82
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)		
	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	c Persentase Desa Mandiri (%)	8.44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	8.44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	4,40
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Birokrasi	60-70	65,07-75,18
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,55	3,91
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	70,89	72,70
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	0,00	0,00
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:		
	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	75,00	100,00
	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	70,00	73,61
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Indeks Rasa Aman (Poin)	50,00	72,82

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
30	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	70,00	77,89
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,38-0,48	0,46-0,57
32	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,00-3,00	1,00-3,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92			
	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14			
	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39			
	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,26	3,41
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)					
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	(Asia Power Indeks - Military Capability)			(Asia Power Indeks - Military Capability)			(Asia Power Indeks - Military Capability)		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,00	67,87
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,00	80,00
39	Indeks Pembangunan Keualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	48,88-57,64	49,84-57,64
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	0,380-0,350
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,81	82,50
	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00			
	c Pengelolaan Sampah			c Pengelolaan Sampah			c Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	16,00	28,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16,00	28,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	20,81	21,21

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Pengelolaan Sampah (%)						Pengelolaan Sampah (%)		
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00			
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a Ketahanan Energi			a Ketahanan Energi			a Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	406-501	569,57-685,4
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18			
	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	6,50 - 6,00	3,89-3,3
	c Ketahanan Air			c Ketahanan Air			c Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	1	5

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpiaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpiaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga terhadap air minum aman (%)	0,50	5,49
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	172,42	140,83
45	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta ton eq2)		
	a Kumulatif	10,06	12,92	a Kumulatif	10,06	12,92			
	b Tahunan	19,04	25,38	b Tahunan	19,04	25,38	a Tahunan	142.488,58	242.844,49

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi dan Demografi**							
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	73,81	74,00	75,16	76,34	77,54	78,76	80,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,66	6,50 - 6,00	5,72-5,17	5,03-4,45	4,42-3,83	3,89-3,3	3,42-2,84
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	N/A	406-501	441,86-541,83	480,88-585,99	523,35-633,75	569,57-685,4	619,87-741,26
4	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	N/A	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
5	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	N/A	0,50	0,91	1,66	3,02	5,49	10,00
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,27	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co_2 Eq)	N/A	142.488,58	164.124,30	189.045,24	217.750,21	242.844,49	279.718,44
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	10,00	10,94	11,96	13,08	14,31	15,65
9	Indeks Risiko Bencana (Poin)	181,49	172,42	163,79	155,60	147,82	140,83	133,41
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,71	20,81	20,91	21,01	21,11	21,21	21,31
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,11	2,02	1,97	1,93	1,88	1,83	1,77
12	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	179,92	183,56	187,18	190,78	194,36	197,92	201,43
13	Rasio penduduk ber-KTP (%)	94,42	95,20	96,00	96,80	97,60	98,50	99,40

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 (%)	93,16	94,32	95,50	96,00	97,20	98,33	99,00
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,8	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
3	Gini Ratio (Poin)	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228	0,215-0,225
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45	7,65-7,49	7,52-7,4	7,41-7,33	7,3-7,25	7,19-7,17	7,09-7,09
5	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,34	74,55 – 76,76	74,91-77,16	75,27-77,56	75,63-77,96	75,99-78,36	76,35-78,76
6	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,96	71,93-72,11	72,18-72,36	72,43-72,61	72,68-72,85	72-94-73,10	73,19-73,35
7	Prevalensi stunting (%)	32,3	29,25	26,20	23,15	20,10	17,05	14,00
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	9,17-9,52	9,30-9,67	9,43-9,81	9,55-9,96	9,68-10,10	9,81-10,25
9	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,5	13,59-13,79	13,66-13,87	13,73-13,95	13,79-14,02	13,86-14,10	13,93-14,18
10	Literasi SD (Poin)	52,84	53,81	54,50	55,00	56,50	57,50	58,50
11	Literasi SMP (Poin)	57,25	62,39	62,50	63,00	63,50	63,80	64,00
12	Numerasi SD (Poin)	52,84	53,81	54,50	55,70	56,00	56,50	57,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Numerasi SMP (Poin)	57,25	62,39	63,70	64,50	65,00	65,50	66,00
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	76,66	77,20	77,80	78,00	78,10	78,50	79,00
15	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	99,38	99,59	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64
16	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	2,18	2,20	2,50	2,80	3,10	3,40	3,70
17	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	87,19	89,20	90,00	92,25	94,45	97,50	98,00
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	N/A	50,00	51,86	53,78	55,78	57,85	60,00
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	91,41	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	40,72	39,68	39,67	39,66	39,65	39,68	40,00
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,042	0,071	0,100	0,128	0,157	0,185	0,214
22	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
24	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	55,15	55,80	56,10	56,40	56,70	57,00	57,30
25	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	56,74	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64	50,08-57,64

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95,38	95,70	95,90	96,10	96,30	96,50	96,70
27	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	79,25	79,50	80,40	81,30	82,20	83,10	84,00
28	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,438	0,410	0,390	0,380	0,375	0,365	0,355
29	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	4	4	4	4	4	4	4
30	Angka Kematian Bayi	0,85	2,34	2,19	2,04	1,89	1,74	1,60
31	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan ketahanan Keluarga	N/A	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
32	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	68,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	N/A	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	80,00
34	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	11,53	11,53	11,53	19,23	19,23	19,23	19,23
35	Bed Occupation Ratio (BOR)	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
36	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	9	9	10	11	12	13	14

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	58,35	60,50	63,00	65,50	68,00	70,50
40	Persentase PPKS yang tertangani (%)	26,00%	26,00%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,00%
41	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00
42	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0,00	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
III	**Aspek Daya Saing Daerah**							
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	48,03	46,59	45,19	43,83	42,52	41,24	40,00
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,26	11,61 – 11,80	12,04-12,24	12,49-12,7	12,95-13,17	13,43-13,66	13,93-14,17
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	1,33	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51	1,5-1,54
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	3,19	3,26	3,30	3,33	3,37	3,41	3,43
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,72	77,19	78,69	80,23	81,79	83,38	85,00
6	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,50	2,63	2,90	3,17	3,44	3,70	3,97
7	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	22,62	40	41	42	43	44	45
8	Indeks Ekonomi Hijau (Poin)	N/A	10,00					25,00
9	Indeks Ekonomi Biru (Poin)	N/A	20,00	20,32	20,64	20,97	21,30	21,64

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Poin)	N/A	52,57	53,63	54,72	55,83	56,95	58,11
11	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,34	41,25	42,35	43,45	45,50	47,07	48,00
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	20,65	19,00	18,74	18,49	18,24	17,99	17,75
13	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	N/A	1,00-3,00	1,11-3,19	1,23-3,39	1,36-3,6	1,51-3,82	1,68-4,06
14	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	83,53	86,04	88,62	91,28	94,01	96,83	99,74
17	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,38-0,48	0,4-0,5	0,42-0,52	0,44-0,54	0,46-0,57	0,49-0,6
19	Inflasi (%)	2,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,066	0,11	0,155	0,177	0,20	0,22	0,266

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	57,648	62,392	65,512	68,787	72,227	75,838	79,630
22	Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,26	1,89	2,52	3,14	4,40	5,03
23	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
24	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	1,26	0,62	0,62	0,62	1,26	0,62
IV	**Aspek Pelayanan Umum**							
A	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	60-70	61,23-71,26	62,48-72,54	63,76-73,85	65,07-75,18	66,4-76,53
2	Indeks Reformasi Hukum (Poin)	51,4	53	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
3	Indeks SPBE (Poin)	2,38	2,60	2,80	3,30	3,50	3,70	4,00
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,47	3,55	3,64	3,73	3,81	3,91	4,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84,36 (B)	85,46	86,69	87,75	88,86	89,00	90,30
6	Indeks Integritas Nasional (Poin)	70,44	70,89	71,34	71,79	72,24	72,70	73,16
B	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**							
1	Persentase Penegakan Perda (%)	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	70,00	70,89	71,78	72,69	73,61	74,54
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
4	Indeks Rasa Aman (Poin)	N/A	50,00	54,93	60,34	66,29	72,82	80,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**							
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,19	3,25	3,31	3,37	3,44	3,50	3,57
	Indikator Kinerja Kunci							
A	**Pendidikan**							
1	Iklim Keamanan SD	69,40	70,87	71,52	72,20	73,50	74,90	75,50
2	Iklim Keamanan SMP	68,84	69,78	70,80	71,90	73,25	74,50	75,50
3	Iklim Kebhinekaan SD	70,93	70,93	71,10	71,70	72,25	72,65	73,00
4	Iklim Kebhinekaan SMP	74,25	74,25	74,70	75,00	75,50	76,00	76,50
5	Iklim Inklusivitas SD	52,39	55,17	57,05	57,75	58,10	58,80	59,25
6	Iklim Inklusivitas SMP	57,09	57,46	57,90	58,10	58,60	59,25	59,50
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	N/A	15,00	25,00	45,00	60,00	70,00	80,00
8	Kualitas Pembelajaran SD	63,10	63,10	63,50	63,80	64,00	64,20	64,50
9	Kualitas Pembelajaran SMP	65,17	65,17	65,25	65,80	66,10	66,30	66,70
10	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
11	Jumlah Pengembangan Bahasa dan Sastra	N/A	2	2	2	3	3	3

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B	**Kesehatan**							
	DINAS KESEHATAN							
1	Jumlah Kematian Balita	0	1	3	3	3	3	3
2	Cakupan imunisasi bayi lengkap	52,00	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
3	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	N/A	77,00	78,00	79,00	79,50	80,00	80,00
5	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
6	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	5,00	5,00	9,00	12,00	18,00	20,00	20,00
8	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	54,80	54,80	56,30	57,80	58,80	69,80	69,80
	RUMAH SAKIT UMUM PANDAN							
1	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
2	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	15,00	16,00	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Jalan dalam kondisi baik (%)	43,76	46,12	48,61	51,24	54,01	56,93	60,00
2	Saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	N/A	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00
3	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	25,00
4	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	25,00
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan Aman)	N/A	40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
8	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	N/A	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
11	Tingkat Kemantapan Jalan	61,12	63,00	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
1	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	N/A	62,00	65,24	68,65	72,25	76,02	80,00
2	Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	N/A	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	N/A	42,96	43,75	44,56	45,39	46,23	47,08
4	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ga yang Ditangani	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	N/A	80,00	85,00	88,75	92,50	96,25	100,00
7	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	N/A	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU							
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	53,85	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
2	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	0,12	0,12	0,20	0,24	0,30	0,30
3	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F	**Sosial**							
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang	NA	80,30	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Melaksanakan Pelayanan Sosial di Diluar Panti Rehabilitasi Sosial							
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Diluar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	NA	80,30	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	55,00	56,50	58,00	59,50	61,00	62,50	64,00
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	75,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	84,77	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	83,26	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
7	Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85,19	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	82,36	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
9	Persentase Penerima Manfaat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	27,6
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	80,97	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
12	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	70,00	72,00	73,00	75,00	75,00	78,00	80,00
13	Persentase Taman Makam Pahlawan Terkelola dengan baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G	**Tenaga Kerja**							
1	Persentase Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	50,90	55,21	57,96	61,59	62,85	64,25	67,46
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	32,00	40,00	45,00	53,00	60,00	65,00	70,00
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.432	11.686	11.989	12.231	12.389	12.578	12.871
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	66,75	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31,25	32,50	35,00	37,50	40,00	42,00	44,00
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	N/A	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,50

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	N/A	48,00	49,44	50,92	52,45	54,02	55,65
I	**Pangan**							
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	77,30	77,35	77,55	77,90	78,50	78,50	80,10
J	**Pertanahan**							
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan (kasus)	3	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar (kasus)	4	4	4	4	4	4	4
3	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penatagunaan Tanah	N/A	15,00	30,00	50,00	70,00	85,00	95,00
5	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	N/A	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	90,00
K	**Lingkungan Hidup**							
1	Timbulan Sampah (Ton)	N/A	66.000,00	64.753,82	63.531,17	62.331,61	61.154,69	60.000,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Kualitas Air	69,00	85,72	85,92	86,12	86,32	86,52	86,72
4	Indeks Kualitas Udara	95,80	83,65	83,85	84,05	84,25	84,45	84,65
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,65	71,69	71,76	71,83	71,90	71,97	72,04
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	100,00	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	9,11	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,90	34,00	39,20	44,40	49,60	54,80	60,10
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	18,2	24,2	24,2	27,3	30,3	33,3	36,4
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	N/A	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
6	Persentase Fasilitasi Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	N/A	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,73	2,67	2,69	2,67	2,65	2,64	2,60
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	14,7	13,7-13,4	12,6-12,3	11,7-11,4	11,0-10,7	10,4-10,1	10,1-9,8
2	Rasio Akseptor KB (%)	N/A	41,50	42,70	43,50	44,50	45,50	47,00
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	39,7	40,50	41,00	42,00	42,75	43,50	44,25
5	Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	25,3	20,00	16,52	16,00	15,00	14,00	13,00
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	28,4	33,0	38,3	44,5	50,0	56,5	70,1
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	79,3	80,9	82,4	83,8	85,1	86,2	87,0
8	Indeks Lansia Berdaya	63,3	64,3	65,2	66,1	67,0	67,8	70,0
O	**Perhubungan**							
1	Rasio Konektivitas (%)	N/A	25,00	25,00	26,00	26,00	27,00	27,00
2	Konektivitas Darat	N/A	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	40,00
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	N/A	83,33	83,33	83,87	83,87	87,10	87,10
P	**Komunikasi dan Informatika**							
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	N/A	60,00	64,33	68,97	73,95	79,28	85,00
Q	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
1	Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	60,00	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,07	0,07	0,09	0,12	0,16	0,20	0,26
3	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	0,50	0,66	0,87	1,15	1,52	2,00
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	60,00	65,00	73,75	82,50	91,25	100,00
6	Pertumbuhan Wirausaha	N/A	4,50	5,00	5,75	6,50	7,25	8,00
R	**Penanaman Modal**							
1	Realisasi Investasi PMDN (Rp miliar)	3.987,48	22,50	24,50	27,00	29,70	32,67	35,94
2	Realisasi Investasi PMA ($US ribu)	129,84	39,97	59,35	62,21	68,43	79,58	82,00
3	Persentase Peningkatan Investor	N/A	5,00	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S	**Kepemudaan dan Olahraga**							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	1,74	1,74	2,00	2,40	2,80	3,20	3,20
2	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,06	2,06	2,25	2,60	3,10	3,50	4,00
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	2	2	3	3	3	3	4
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	35,00
T	**Statistik**							
1	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	1,9	2,60	2,80	3,00	3,20	3,50	3,70
2	Buku Kabupaten dalam Angka (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
U	**Persandian**							

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00
V	**Kebudayaan**							
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
4	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	13	13	30	30	30	30	30
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
W	**Perpustakaan**							
1	Jumlah Pengunjung ke perpustakaan dalam 1 tahun (Jumlah Orang)	10.501	2.991	3.091	3.120	3.220	3.320	3.550
2	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis (Jumlah orang)	302	308	312	317	322	325	328
3	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00	85,00	88,75	92,50	96,25	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
X	**Kearsipan**							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik (Jumlah OPD dan Kecamatan)	8,00	10,00	13,45	16,90	20,34	23,79	30,00
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	D	C	C	CC	B	BB	A
Y	**Pariwisata**							
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	44	100	150	200	250	300	350
2	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	340.280	401.876	411.071	420.475	430.095	439.935	450.000
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,5
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-11,41	18,12	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	20,00	25,00	31,25	37,50	43,75	50,00
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	35,00	40,00	48,75	57,50	66,25	75,00
Z	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	N/A	7,00	7,80	8,68	9,67	10,77	12,00
2	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	95,00	97,83	100,74	103,73	106,82	110,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (Poin)	N/A	90,00	92,82	95,72	98,72	101,81	105,00
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	41.498	52.192	54.213	57.324	60.757	66.833	73.515
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	650,16	880,00	898,579	915,068	932,181	952,852	980,606
AA	**Pertanian**							
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	47,02	45,50	44,14	42,82	41,53	40,29	39,08
2	Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp juta/jiwa)	80,44	90,00	97,62	105,88	114,85	124,57	120,00
3	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	90,00	93,69	97,52	101,52	105,67	110,00
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	N/A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5	Peningkatan Produksi hortikultura	N/A	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7	Cakupan Luas Lagan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	75,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00
8	Tingkat Pengendalian Penyakit hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	65,00	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	30,00	35,00	42,50	50,00	57,50	65,00
10	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	60,00	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00
11	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	N/A	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
12	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
13	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
14	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AB	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
2	Rasio Elektrifikasi (%)	N/A	90,00	90,98	91,97	92,97	93,98	95,00
AC	**Perdagangan**							
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00
2	Persentase Stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	N/A	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Tertib Usaha Perdagangan	N/A	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
AD	**Perindustrian**							
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	N/A	6,16	6,27	6,39	6,51	6,63	6,75
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AE	**Perencanaan Pembangunan**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	73,61	77,40	81,39	85,59	90,00
2	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AF	**Keuangan**							
1	Opini BPK (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Return on Asset BUMD (%)	N/A	6,25	6,85	7,52	8,25	9,04	9,92
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	35,00	30,00	27,50	25,00	22,50	20,00
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	37,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
6	Persentase Penurunan SILPA	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,34	7,49	7,64	7,79	7,94	8,10	8,26
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	70,00	75,00	81,25	87,50	93,75	100,00
AG	**Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan**							
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	62,23	64,30	66,25	68,75	71,50	73,75	75,25
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	84,57	85,30	86,00	87,25	88,00	89,15	90,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural (%)	10,49	11,00	11,50	12,25	13,00	13,75	14,50

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	87,00	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	60,00	65,00	73,75	82,50	91,25	100,00
6	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	85,00	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
AH	**Penelitian dan Pengembangan**							
1	Belanja Riset (% Total Belanja)	N/A	0,33	0,45	0,60	0,82	1,11	1,50
2	Persentase kebijakan berbasis bukti (%)	N/A	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00
3	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah							
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
AI	**Pengawasan**							
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Maturitas SPIP (Level)	N/A	II	III	III	III	III	III
3	Kapabilitas APIP (Level)	N/A	II	III	III	III	III	III
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	II	III	III	III	III	III
6	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	II	III	III	III	III	III
AJ	**Sekretariat Daerah**							
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	CC	CC	B	B	B	BB
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00



BAB V

Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan utama bagi seluruh kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini berperan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sekaligus referensi bagi seluruh masyarakat Tapanuli Tengah agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan yang meliputi keselarasan antara perencanaan dan pendanaan, penerapan kerangka pengendalian yang efektif, penerapan sistem insentif guna mendorong partisipasi, serta mekanisme penyesuaian yang fleksibel dan responsif. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran daerah.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis dan operasional, RPJMD 2025-2029 bukan sekadar acuan normatif, melainkan diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah secara optimal supaya bersama-sama “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban”. Implementasi pembangunan selama lima tahun ke depan dirancang agar berjalan terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi antar dokumen perencanaan serta kesesuaian dengan kebijakan pendanaan. Sinergi ini penting untuk memastikan tiga aspek utama: pertama, pelaksanaan yang selaras dengan rencana; kedua, ketersediaan sumber dana yang memadai; dan ketiga, pemanfaatan anggaran secara efisien. Perencanaan yang terintegrasi dan berkualitas tidak hanya menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi berbagai pihak di luar pemerintahan untuk turut berkontribusi dalam pencapaian

tujuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Proses ini mencakup penetapan prioritas pembangunan hingga penyusunan teknis proyek serta target yang ingin dicapai, disertai dengan pengawasan pelaksanaan secara ketat. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Penguatan tata kelola perencanaan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- Menyelaraskan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan kebijakan fiskal yang berlaku.
- Mengembangkan sistem monitoring terintegrasi yang mencakup aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- Membentuk forum konsultasi untuk melakukan tinjauan bersama terhadap dokumen perencanaan.
- Menerapkan prinsip perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang didukung oleh data yang akurat dan tepercaya.

Perencanaan ini tidak hanya harus konsisten secara internal, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang nyata di lapangan. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

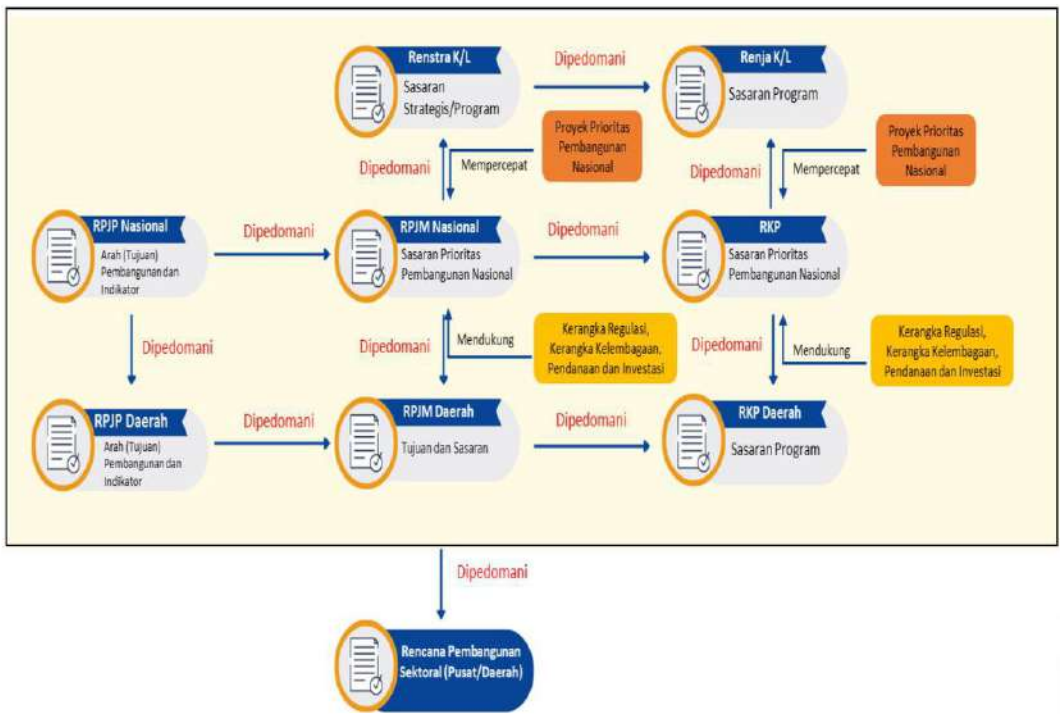
A Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat

RPJMD menempati posisi strategis dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi dokumen perencanaan yang lebih rinci di tingkat bawah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), yang semuanya wajib dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RPJMD memfokuskan pada penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah pembangunan, serta indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah. Elemen-elemen ini kemudian menjadi panduan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam merancang tujuan, sasaran, dan program pembangunan tahunan. Seluruh perencanaan pembangunan daerah tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, di mana RPJPD daerah mengikuti RPJPN nasional, RPJM daerah sejalan dengan RPJMN nasional, dan RKP daerah mengikuti RKP nasional. Selain itu, seluruh rencana sektoral harus mengacu pada rencana pembangunan daerah yang mencakup jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. RPJMD bersifat jangka menengah dan memberikan arah pembangunan dalam rentang waktu lima tahun. Dokumen ini khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan yang mendukung visi dan misi RPJMN serta Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis daerah untuk lima tahun ke depan.
2. Penyusunan RPJMD, termasuk penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan indikator pembangunan, harus mengacu pada arah pembangunan dan indikator yang tertuang dalam RPJMN serta RPJMD tingkat provinsi.
3. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD kabupaten didasarkan pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan yang ada pada RPJM provinsi dan nasional. Selain itu, RPJMD kabupaten menjadi acuan bagi sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RKP daerah, serta sasaran dan indikator strategis pada rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja (Renja) OPD. Sementara itu, tujuan dan sasaran RPJM daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program dalam RKP daerah.
5. Sasaran program dalam RKP daerah mengacu pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP. RKP daerah juga menjadi pedoman dalam merancang sasaran dan indikator program pada Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yang digunakan sebagai alat penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Untuk mempercepat pencapaian sasaran tersebut, sasaran program juga ditetapkan dalam RPJM

dan RKP daerah, lengkap dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu Program Prioritas Nasional, Penguatan Kesetaraan Gender yang selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dapat dipedomani dalam pengaktualan RPJM ke RKP daerah untuk mempercepat tercapainya upaya lintas sektor terhadap pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui komitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang sensitif gender yang didukung oleh data terpilah, kapasitas kelembagaan, dan penganggaran yang responsif gender (ARG).

B Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah harus didukung oleh sinkronisasi yang efektif antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk memastikan target pembangunan terealisasi, optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta diperlukan dengan pendekatan yang inovatif, terintegrasi, serta tepat sasaran.

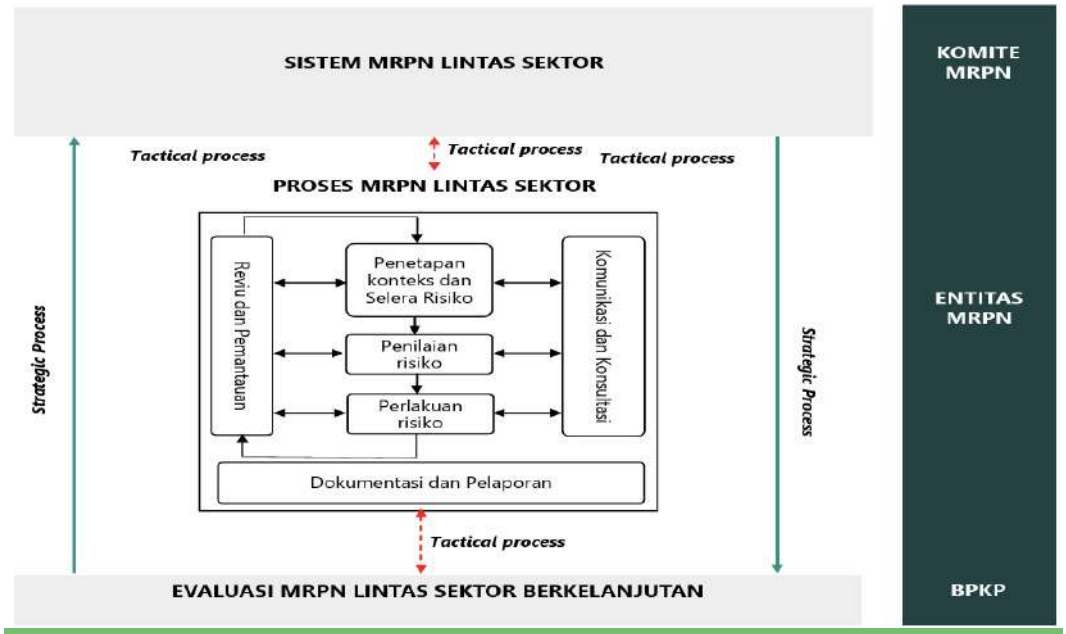
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sumber pendanaan tersebut, kualitas pengelolaan belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan beragam sumber pendanaan, seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan melalui utang daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dana non-APBN/ APBD. Seluruh sumber dana ini diarahkan untuk menganggarkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berkelanjutan.

5.1.2 Kerangka Pengendalian

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan, diperlukan pengendalian yang terus-menerus dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh sistem elektronik terpadu dan pengelolaan data pembangunan yang komprehensif. Pengendalian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko sepanjang proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sistem elektronik yang terintegrasi ini berperan penting dalam mendukung proses tersebut sekaligus mendorong penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).

Dalam manajemen risiko, yang dimaksud adalah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola risiko yang muncul pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, maupun risiko lintas sektor tertentu dengan tujuan utama meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari implementasi MRPN, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan manajemen risiko sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini mencakup pembentukan komite manajemen risiko, penyusunan kebijakan terkait, perencanaan kinerja prioritas pembangunan, identifikasi objek dan entitas yang menjadi fokus MRPN, serta pelaksanaan penilaian risiko (risk assessment). Pengambilan serta pelaksanaan keputusan manajemen risiko sangat penting untuk meningkatkan peluang tercapainya tujuan pembangunan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari risiko yang dihadapi entitas yang dikelola.

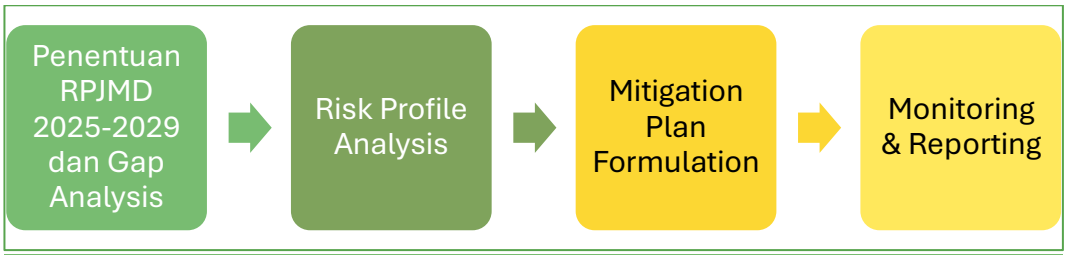


Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode, serta menjaga sinkronisasi antara periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan tahapan manajemen risiko yang komprehensif serta pembentukan dasar hukum yang menjamin integrasi manajemen risiko tersebut dalam pelaksanaan pembangunan. Tahapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

1. Penetapan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029 dilakukan dengan merumuskan arah kebijakan dan target yang hendak dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan visi "Menuju Tapanuli Tengah Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan." Proses penyusunan diawali dengan gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya—sebuah metode sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan antara target pembangunan yang direncanakan dengan capaian aktual, guna mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

   Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen strategis guna meningkatkan kualitas perencanaan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap indikator kinerja yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data historis pencapaian dibandingkan dengan target yang akan dicapai untuk menemukan kesenjangan. Analisis ini tidak hanya menilai hasil akhir (outcome), tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan serta kendala struktural dan operasional yang dihadapi.
2. Analisis Profil Risiko (*Risk Profile Analysis*) dilakukan melalui proses identifikasi dan asesmen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengenalan potensi risiko dari faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pencapaian target RPJMD 2025-2029. Asesmen risiko kemudian menilai kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) serta tingkat dampak serius (*severity*) dari risiko tersebut. Penilaian ini penting untuk menentukan prioritas penanganan risiko dan merancang langkah mitigasi yang tepat.
3. Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Mitigasi secara kolaboratif bersama kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Proses ini meliputi

identifikasi risiko utama yang harus diatasi serta penetapan jadwal pelaksanaan mitigasi secara terperinci untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko dalam rangka penyusunan RPJMD.

4. Terakhir, pelaksanaan monitoring dan pelaporan menjadi aspek krusial untuk menjaga agar implementasi RPJMD berjalan sesuai rencana. Evaluasi berkala dilakukan guna mengukur pencapaian target sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan pemantauan dari internal pemerintah daerah serta partisipasi lembaga pengawas dan organisasi masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperoleh masukan konstruktif untuk penyempurnaan pelaksanaan RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri

   Risiko utama yang dapat menghambat pencapaian misi ini adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan. Kurangnya kurikulum yang adaptif serta fasilitas penunjang yang memadai dapat menyebabkan peserta didik kurang terampil dan tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau memulai usaha mandiri. Selain itu, rendahnya dukungan fasilitas pembinaan karakter dan kreativitas dapat menurunkan daya saing sumber daya manusia daerah. Risiko sosial seperti pengangguran dan cadangan tenaga kerja tidak terserap menjadi tantangan. Ketidakmerataan kesempatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga berpotensi menciptakan kesenjangan kemampuan dan peluang kerja. Kebijakan yang tidak terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan dan kewirausahaan dapat menyebabkan program pembangunan manusia menjadi kurang efektif dalam mendukung kesiapan kerja dan iklim kewirausahaan yang kuat.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani

   Salah satu risiko utama dalam misi ini adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata serta minimnya tenaga medis di daerah terpencil, yang menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran juga dapat menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan sehingga target kesehatan jasmani sulit dicapai. Selain itu, kurangnya program yang memadai untuk kesehatan rohani atau mental memperbesar risiko masalah kesehatan psikologis yang tidak tertangani. Risiko lain adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Apabila pengelolaan data kesehatan tidak optimal, pengambilan kebijakan juga akan kurang tepat sasaran. Ketersediaan obat-obatan dan layanan preventif juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi agar akses kesehatan dapat diwujudkan secara menyeluruh.

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

   Risiko yang mungkin timbul adalah kebijakan yang tidak cukup responsif atau lambat dalam menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil-menengah. Ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar juga menjadi hambatan utama yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah. Terbatasnya koordinasi antar lembaga pelaksana dan kurangnya pemberdayaan masyarakat menambah risiko ketidakefektifan program penguatan kapasitas ekonomi rakyat. Selain itu, risiko eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan gangguan rantai pasok dapat mengancam ketahanan ekonomi petani dan nelayan. Kelemahan dalam diversifikasi usaha dan inovasi dalam skala usaha kecil-menengah juga

dapat menghambat inklusivitas dan kreativitas ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi lokal menjadi tidak berkelanjutan dan tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan.

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi

   Risiko yang dihadapi dari misi ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan digital sehingga pemanfaatan sumber daya lokal berbasis teknologi tidak optimal. Rendahnya literasi digital dan kurangnya akses ke teknologi bagi pelaku usaha lokal menjadi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu, kemampuan SDM dalam mengelola teknologi secara efektif masih perlu ditingkatkan agar inovasi teknologi dapat mendukung kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Risiko lainnya adalah potensi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dikelola secara berkelanjutan, yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan sekaligus melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang. Jika kebijakan dan regulasi mengenai pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal tidak kuat atau kurang disosialisasikan, maka risiko penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan teknologi akan meningkat, mengurangi manfaat yang bisa diperoleh masyarakat.

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban

   Risiko dari misi tersebut adalah potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan menghambat penegakan hukum yang adil. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Kesulitan dalam membangun budaya birokrasi yang berintegritas dan beretika menjadi tantangan lain dalam

mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, risiko kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 atau tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat rentan berisiko memperlemah rasa keadilan sosial dan keberadaban yang ingin diwujudkan sehingga menimbulkan ketimpangan pelayanan dan konflik sosial.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia

   Risiko yang dihadapi pada misi ini, meliputi tergerusnya nilai dan tradisi lokal akibat pengaruh globalisasi serta modernisasi yang cepat sehingga generasi muda kurang memahami dan meneruskan kebudayaan daerah. Minimnya dukungan dana dan program konservasi budaya dapat membuat pelestarian kebudayaan terabaikan. Lebih jauh, potensi konflik sosial antar kelompok etnis atau agama berisiko meningkat apabila semangat toleransi tidak diperkuat melalui kebijakan dan praktik sosial yang inklusif. Selain itu, kurangnya integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan dan budaya sehari-hari masyarakat dapat menyebabkan budaya lokal tidak menjadi bagian hidup yang aktif dan dinamis. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan juga menimbulkan risiko rendahnya partisipasi publik. Hal ini dapat melemahkan kohesi sosial yang menjadi fondasi kebhinnekaan dan toleransi.

7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya

   Risiko dalam pembangunan infrastruktur adalah terbatasnya anggaran dan ketidakefisienan pengelolaan dana yang mengakibatkan penundaan atau kualitas rendah proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, kurangnya perencanaan yang matang dan analisis dampak lingkungan dapat

menyebabkan pembangunan infrastruktur berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Korupsi dan mafia proyek juga menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Risiko lain adalah gangguan dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi yang dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun. Kurangnya pemeliharaan dan monitoring juga menimbulkan risiko kerusakan dini sehingga investasi infrastruktur tidak optimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam teknis dan manajerial juga dapat menghambat pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur.

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

   Risiko yang dihadapi dari misi ini adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan menurunnya produktivitas jangka panjang. Ketidakjelasan regulasi atau lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, risiko konflik antar pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah juga dapat menghambat pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan adil. Selain risiko ekologis, ada pula risiko ekonomi dan sosial seperti ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan fluktuasi pasar global, serta kurangnya diversifikasi yang dapat memicu kerentanan ekonomi daerah. Minimnya akses teknologi ramah lingkungan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan yang optimal.

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi

   Risiko dalam perencanaan pembangunan terintegrasi adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, yang berpotensi menimbulkan duplikasi program dan pemborosan sumber daya. Ketidakselarasan data dan informasi antara daerah dan desa juga menghambat pengambilan keputusan yang terpadu dan akurat. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial di tingkat desa dapat mengganggu proses perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Risiko lain adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang dapat menyebabkan perencanaan kurang tepat sasaran dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana juga berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pembangunan sehingga menghambat pencapaian sinergi pembangunan daerah dan desa.

Dengan mengidentifikasi serta merancang strategi manajemen risiko yang tepat pada setiap pencapaian misi, pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dapat menjadi lebih efektif sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengendalian Perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan memegang peranan penting dalam memastikan keselarasan serta konsistensi seluruh proses pembangunan. Mekanisme ini bertujuan utama untuk meningkatkan mutu perencanaan dengan melakukan penyempurnaan terhadap desain program dan target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, pengendalian ini juga berfungsi sebagai instrumen verifikasi terhadap ketersediaan dan kecukupan sumber pembiayaan, baik yang berasal dari

APBD/APBN maupun mitra pembangunan non-pemerintah. Proses pengendalian dilaksanakan dengan mengacu pada evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Analisis mendalam atas pencapaian serta tantangan pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya menjadi dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan proses perencanaan yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan nyata di lapangan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

   Pengendalian dalam tahap pelaksanaan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Implementasi dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang berlangsung secara kontinu untuk mengukur capaian kinerja pembangunan jangka pendek (tahunan). Sistem ini didukung oleh pelaporan berkala yang memfasilitasi pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu. Evaluasi tahunan menjadi bahan pembelajaran penting untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya sekaligus memastikan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

   Agar pengendalian pembangunan dapat berjalan efektif, diperlukan payung hukum yang kuat dan menyeluruh. Kerangka regulasi tersebut harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan pembangunan, meliputi antara lain:

   a. Sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur
   b. Mekanisme pengendalian yang responsif
   c. Manajemen risiko pembangunan yang proaktif
   d. Sistem manajemen kinerja yang terukur

Harmonisasi regulasi ini penting untuk menjamin keselarasan antara proses pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi regulasi juga menjadi dasar penguatan

sistem manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel. Di sisi kelembagaan, dibutuhkan pembentukan struktur pengendalian yang komprehensif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Fungsi Koordinasi Lintas Sektor yang dapat mengintegrasikan pengendalian secara vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Daerah) serta horizontal (antar OPD)
2. Mekanisme Kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3. Sistem Pelaporan Terpadu berbasis teknologi informasi
4. Kapasitas Kelembagaan yang memadai dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan

5.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga riset, akademisi, dan komunitas masyarakat merupakan faktor kunci dalam mempercepat tercapainya target pembangunan. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan efektif, perlu dikembangkan sistem insentif yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan. Bagi unsur pemerintah, insentif diintegrasikan dengan mekanisme manajemen kinerja serta penganggaran daerah yang holistik. Pemberian insentif didasarkan pada pencapaian kinerja nyata, meliputi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi program dengan pendanaan, pencapaian indikator makroekonomi, serta realisasi program prioritas daerah.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan. Sementara itu, bagi pelaku non-pemerintah, sistem insentif dirancang lebih beragam dan aplikatif, meliputi kemudahan perizinan, fasilitas usaha, akses pendanaan, hingga penghargaan khusus. Insentif ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dan

masyarakat dalam pembangunan. Dengan sistem insentif yang terstruktur dan terukur tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang solid antar pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kontribusi memberikan dampak signifikan dalam percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat menjadi upaya bersama yang memaksimalkan potensi dan sumber daya lokal secara optimal.

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika pembangunan, dokumen perencanaan daerah perlu dirancang secara adaptif agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai faktor eksternal yang tidak terduga. Kondisi force majeure seperti ketegangan geopolitik global, fluktuasi ekonomi internasional, serta bencana alam berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan. Jika terjadi penyimpangan signifikan dari rencana awal sehingga target RPJMD sulit dicapai, mekanisme revisi melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah menjadi solusi krusial. Revisi ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh pelaksanaan pembangunan serta analisis kondisi terkini, guna memastikan target yang ditetapkan tetap relevan dan dapat direalisasikan meskipun dalam situasi perubahan yang dinamis.

Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif, pemerintah daerah mengoptimalkan transformasi digital dengan mengembangkan sistem elektronik terpadu yang mencakup seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan tata kelola data yang baik menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan memanfaatkan data referensi yang terstandarisasi dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Perpaduan antara perencanaan yang fleksibel dan pemanfaatan teknologi digital ini menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang lebih tangguh, responsif, dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan RPJMD 2025-2029, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang periode pembangunan.

5.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif menjadi landasan utama bagi pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam kerangka RPJMD 2025-2029, komunikasi tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dirancang untuk membangun dialog konstruktif antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip "*no one left behind*" dijadikan pijakan utama guna memastikan setiap suara terdengar dan setiap kelompok mendapatkan akses yang setara terhadap informasi pembangunan. Sistem komunikasi publik ini terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, tata kelola komunikasi yang terstruktur dan profesional dengan mengintegrasikan koordinasi lintas sektor serta inovasi dalam penyampaian pesan. Kedua, penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, menarik, dan tepat waktu. Ketiga, penerapan pendekatan partisipatif berbasis data yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran yang disesuaikan dengan karakteristik para pemangku kepentingan. Forum OPD berfungsi sebagai ruang konsultasi teknis antar perangkat daerah, sementara musyawarah berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi menjaga konsistensi kebijakan. Masyarakat umum, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan kelompok rentan, dilibatkan melalui metode komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang benar-benar terbuka, di mana setiap kebijakan pembangunan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dengan

demikian, komunikasi publik bukan hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban” memerlukan penguatan kapasitas pembiayaan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Strategi pembiayaan disusun secara menyeluruh dengan memaksimalkan peran sektor publik dan non-publik, sambil mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

Penguatan pembiayaan sektor publik dilaksanakan melalui lima strategi utama. Pertama, peningkatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Kedua, pengembangan kerja sama bilateral dan multilateral guna memperoleh pembiayaan inovatif dengan persyaratan menguntungkan. Ketiga, optimalisasi kemitraan pemerintah dengan badan usaha melalui penyempurnaan regulasi dan tata kelola. Keempat, penerapan skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal dan UMKM. Kelima, pemanfaatan aset daerah secara optimal melalui mekanisme seperti daur ulang dan pengelolaan nilai aset. Di sisi lain, pengembangan pembiayaan sektor non-publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen inovatif, meliputi dana pensiun, pasar modal, produk pembiayaan syariah, serta inovasi pembiayaan hijau dan biru. Penguatan blended financing yang mengombinasikan berbagai sumber dana juga dikembangkan, termasuk skema berbasis transaksi seperti bursa karbon dan plastik sebagai respons terhadap isu perubahan iklim.

Agar pembiayaan dapat berjalan efektif, penguatan manajemen investasi menjadi faktor krusial. Strategi yang dijalankan mencakup penyempurnaan proses identifikasi dan evaluasi proyek, modernisasi sistem pemantauan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan

sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik mendapatkan perhatian khusus, didukung oleh penguatan kerangka regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan terpadu ini, Kabupaten Tapanuli Tengah membangun ekosistem pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan, serta menciptakan sinergi optimal antara sektor publik dan non-publik demi percepatan pembangunan daerah.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran utama, arah kebijakan daerah, serta indikator kinerja dan program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis di tingkat daerah. RPJMD juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan setiap tahun.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 memiliki peran krusial dalam keberhasilan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan visi dan misi daerah, yaitu “Menuju Tapanuli Tengah Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut harus didukung oleh sejumlah faktor kunci, antara lain:

1. Komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
3. Keberpihakan pembangunan kepada masyarakat;
4. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah; serta
5. Upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan perencanaan.

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kolaborasi nyata dari semua lapisan masyarakat. Dukungan politik yang solid, komitmen pelaksanaan yang serius, rasa tanggung jawab, dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam mendorong gerakan pembangunan daerah. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor usaha, akademisi, hingga kelompok agama dan pemuda, diharapkan berperan aktif dengan komitmen penuh. Sinergi ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan diwujudkan melalui tindakan konkret, baik dalam pelaksanaan program pembangunan, pengawasan partisipatif, maupun beragam inisiatif lokal yang mendorong kemajuan. Terwujudnya visi dan misi ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Tapanuli Tengah

Masinton Pasaribu